PROFIL DAN POTENSI KAMPUNG APURI DISTRIK MIMIKA BARAT TAHUN 2025

"Membangun dari Kampung Ke Kota, Membangun Kampung Rasa Kota"



KATA PENGANTAR PENYUSUN

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyelenggaraan-Nya, proses penyusunan **Profil dan Potensi Kampung Apuri Distrik Mimika Barat** dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan dokumen ini merupakan langkah strategis mendukung akselerasi pembangunan kampung yang berorientasi pada data akurat dan informasi faktual hasil observasi serta pengumpulan data lapangan. Melalui proses yang sistematis, terverifikasi dan partisipatif, dokumen ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kampung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Atas nama Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM), kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) atas kepercayaan yang diberikan kepada IPPM sebagai lembaga penyusun. Kepercayaan ini merupakan tanggungjawab besar yang kami emban dalam mendukung pembangunan kampung yang lebih terarah, partisipatif dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa proses penyusunan dokumen ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, baik dalam pengumpulan data, mobilisasi ke lapangan, maupun koordinasi lintas pihak. Namun berkat kerja keras tim serta dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, seluruh tahapan dapat dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan untuk menghasilkan dokumen yang komprehensif.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Dinas PMK dan staf, Kepala Distrik Mimika Barat beserta seluruh staf, Kepala Kampung Apuri dan aparat kampung, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan informasi, waktu dan bantuan selama proses pengumpulan data berlangsung. Kontribusi semua pihak menjadi bagian penting dalam keberhasilan penyusunan dokumen ini.

Kami juga sangat mengharapkan masukan konstruktif untuk penyempurnaan dokumen pada tahap berikutnya. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan dan berkelanjutan demi terwujudnya pembangunan kampung di kabupatem Mimika yang lebih maju dan mandiri.

Jayapura, 15 Desember 2025
Direktur IPPM,

Yohannes Rahail

KATA PENGANTAR KEPALA KAMPUNG

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaan-Nya, Profil Kampung Apuri ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai upaya bersama Pemerintah Kampung Apuri dalam menghadirkan data dan informasi yang akurat, terintegrasi, serta mencerminkan kondisi riil kehidupan masyarakat kampung.

Penyusunan Profil Kampung Apuri bertujuan untuk menggambarkan secara utuh kondisi kependudukan, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta potensi dan permasalahan yang dihadapi kampung. Profil ini diharapkan menjadi basis data dan rujukan utama dalam proses perencanaan pembangunan kampung, penyusunan RPJM Kampung, RKP Kampung, serta sebagai bahan pendukung dalam musyawarah kampung dan koordinasi dengan pemerintah distrik dan kabupaten.

Dokumen Profil Kampung ini juga memiliki manfaat strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan tersedianya data yang valid dan mutakhir, Pemerintah Kampung Apuri dapat merancang program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, serta sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan penguatan ekonomi kampung.

Saya berharap Profil Kampung Apuri ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai alat perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kampung. Lebih dari itu, dokumen ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan kampung yang berkelanjutan, berbasis kearifan lokal, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat Kampung Apuri.

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kampung Apuri ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kampung Apuri dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Mimika, 16 Desember 2025
Kepala Kampung Apuri,

Theoudorus Takati

KATA PENGANTAR KEPALA DISTRIK

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, penyertaan, dan tuntunan-Nya, **Dokumen Profil dan Potensi Kampung Apuri** di wilayah Distrik Mimika Barat dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan langkah strategis dalam mengakselerasi pembangunan kampung yang berbasis pada data dan informasi faktual di lapangan, sehingga setiap perencanaan dan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Penyusunan dokumen ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kapasitas Pemerintah Kampung, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi riil, potensi lokal, dan kebutuhan masyarakat kampung. Melalui Profil Kampung ini, diharapkan Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung, serta seluruh pemangku kepentingan memiliki rujukan yang jelas dan komprehensif dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan ke depan.

Atas tersusunnya dokumen ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) yang telah bekerja secara profesional sebagai tim penyusun. Dengan metodologi yang terstruktur, berbasis bukti, serta didukung oleh proses pengumpulan data lapangan yang komprehensif, IPPM telah menghasilkan dokumen yang tidak hanya informatif, tetapi juga relevan dan bermanfaat sebagai dasar perencanaan pembangunan kampung.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada aparat kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, serta seluruh masyarakat Kampung Apuri di Distrik Mimika Barat yang telah memberikan dukungan, data, informasi, dan partisipasi aktif selama proses penyusunan dokumen ini berlangsung.

Semoga Dokumen Profil dan Potensi Kampung Apuri ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi pijakan penting dalam mewujudkan pembangunan kampung yang mandiri, produktif, dan berkeadilan.

Mimika, 18 Desember 2025
Kepala Distrik Mimika Barat,

Christian Warinussy, S.Sos

SAMBUTAN KEPALA DINAS PMK MIMIKA

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya, **Dokumen Profil dan Potensi Kampung Apuri, Distrik Mimika Barat** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memperkuat pembangunan kampung yang berbasis pada data yang akurat, informasi faktual serta pemetaan kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah.

Penyusunan dokumen ini merupakan wujud nyata kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta mitra profesional yang berkompeten. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Distrik Mimika Barat beserta jajaran, Kepala Kampung Apuri bersama seluruh aparat kampung, serta masyarakat Kampung Apuri yang telah memberikan data, informasi, dan dukungan aktif selama proses pengumpulan dan verifikasi lapangan. Kontribusi ini sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi objektif dan dinamika nyata kampung.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) selaku tim penyusun. Melalui pendekatan metodologis yang terstruktur, IPPM telah melaksanakan proses penyusunan dokumen ini dengan observasi langsung, kajian analitis, serta verifikasi data secara berjenjang. Meskipun menghadapi berbagai kendala teknis dan tantangan lapangan, IPPM mampu menyelesaikan dokumen ini secara baik, akurat dan sesuai dengan kaidah penyusunan profil kampung. Dedikasi tersebut merupakan kontribusi penting dalam mendukung percepatan pembangunan kampung di Kabupaten Mimika.

Sejalan dengan terbitnya dokumen ini, kami berharap penyusunan profil dan potensi kampung dapat diperluas dan direplikasi ke seluruh kampung di Kabupaten Mimika. Dengan tersedianya basis data kampung yang lengkap, mutakhir, dan terpadu, setiap kampung diharapkan mampu berkembang sebagai model perencanaan pembangunan berbasis data, serta menjadi rujukan dalam pengembangan inovasi, penguatan tata kelola pemerintahan kampung, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat akar rumput.

Dokumen Profil dan Potensi Kampung ini memiliki nilai strategis sebagai dasar perencanaan pembangunan, baik di tingkat kampung, distrik, maupun kabupaten. Data yang lengkap dan komprehensif akan menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan, serta penguatan intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik lokal. Lebih dari itu, dokumen ini diharapkan dapat memperkuat identitas kampung serta membuka ruang pengembangan potensi unggulan yang berdaya saing.

Akhir kata, kami berharap agar dokumen ini terus diperbarui secara berkala dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan. Saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini pada masa mendatang. Semoga kerja kolaboratif ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan kampung-kampung di Kabupaten Mimika yang mandiri, produktif, berdaya saing, serta berkontribusi nyata bagi terwujudnya Mimika sebagai Gerbang Emas.

Timika, 19 Desember 2025
Kepala Dinas,

Abraham Y. Kateyau, SE., MH

SAMBUTAN BUPATI MIMIKA

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyelenggaraan dan penyertaan-Nya, Kabupaten Mimika terus berbenah dalam melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan "Membangun dari kampung ke kota", maka **Dokumen Profil dan Potensi Kampung Apuri** dapat diselesaikan sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat arah pembangunan kampung di Kabupaten Mimika.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, arah pembangunan di Tanah Papua mengalami perubahan yang mendasar. Kebijakan Otonomi Khusus memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah, termasuk Kabupaten Mimika, untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara lebih kontekstual, partisipatif, serta selaras dengan karakter sosial, budaya dan kondisi geografis masyarakat Papua.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua. Dokumen strategis ini menegaskan tiga pilar utama pembangunan Papua, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif, sebagai upaya mempercepat transformasi pembangunan Papua secara menyeluruh dan berkelanjutan, sekaligus menjawab ketertinggalan kualitas sumber daya manusia yang bersifat struktural.

Dalam konteks Kabupaten Mimika, kita menyadari bahwa tantangan pembangunan masih bersifat kompleks dan multidimensional. Ketimpangan antar wilayah masih nyata, terutama antara kawasan perkotaan yang berkembang pesat dengan kampung-kampung di wilayah pedalaman dan pesisir yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kuatnya peran adat dan tradisi menjadi faktor penting yang memengaruhi dinamika pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat kampung.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kabupaten Mimika sangat ditentukan oleh ketersediaan data dan informasi kampung yang akurat, lengkap dan mutakhir. Selama ini, basis data kampung yang terpadu belum sepenuhnya tersedia, sehingga perencanaan pembangunan sering kali belum didukung oleh landasan teknokratis yang kuat. Untuk itu penyusunan profil dan potensi kampung menjadi kebutuhan yang mendesak sebagai fondasi pembangunan yang objektif, terukur dan berkelanjutan.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui visi pembangunan tahun 2024-2029, “Mewujudkan Mimika yang Responsif, Energik, Transparan, Terampil, Objektif dan Berdaya Saing menuju Gerbang Emas”, menetapkan arah kebijakan pembangunan yang dimulai dari kampung dengan pendekatan **“**Membangun dari Kampung ke Kota, Membangun Kampung Rasa Kota.” Pendekatan ini menempatkan kampung sebagai titik awal pembangunan wilayah, dengan perencanaan yang komprehensif, partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Penyusunan profil dan potensi kampung berbasis satu data merupakan langkah strategis dalam memperkuat implementasi pendekatan tersebut.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) yang telah menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Mimika dalam penyusunan dokumen ini. Dengan tersusunnya dokumen Profil dan Potensi Kampung Apuri ini, Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki landasan yang lebih kuat untuk mempercepat pembangunan kampung secara sistematis, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Data yang tersaji tidak hanya menjadi pijakan perencanaan, tetapi juga sarana untuk memperkuat identitas kampung, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta meningkatkan daya saing kampung secara berkelanjutan.

Akhir kata, saya berharap dokumen ini dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan dan terus diperbarui secara berkala. Semoga upaya ini menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan kampung-kampung di Kabupaten Mimika yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan Mimika sebagai Gerbang Emas.

Timika, 19 Desember 2025
Bupati,

Johannes Rettob, S.Sos., MM

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar Penyusun ii
Kata Pengantar Kepala Kampung iii
Kata Pengantar Kepala Distrik iv
Sambutan Kepala Dinas PMK v
Sambutan Bupati Mimika vii
Daftar Isi x
Daftar Tabel xi
Daftar Gambar xii

Bagian I. **PENDAHULUAN** 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 2
C. Manfaat 3
Bagian II. **METODOLOGI** 5
Bagian III. **PROFIL DAN POTENSI KAMPUNG**..... 10
A. Keadaan Wilayah Kampung 10
1. Sejarah 10
2. Keadaan Wilayah 16
B. Keadaan Perumahan 22
1. Tipe dan Kondisi Bangunan Rumah 22
2. Pola Permukiman 23
3. Kepemilikan Rumah 24
4. Luas Bangunan dan Jumlah Kamar 24
5. Ketersediaan Fasilitas Dasar Rumah Tangga 25
6. Kondisi Lingkungan Permukiman 26
7. Masalah utama dan Kebutuhan perumahan. 27
C. Kependudukan 28
1. Suku-suku di Kampung 28
2. Nilai dan Kearifan Lokal 30
3. Keadaan Penduduk 34
4. Migrasi dan Mobilitas Penduduk 41
D. Pendidikan 44
1. Konsep Masyarakat tentang Pendidikan 44
2. Kelembagaan Pendidikan 47
3. Keadaan Guru dan Murid 50
4. Partisipasi Siswa dalam Proses Belajar-Mengajar 52
5. Pendidikan NonFormal 55
E. Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana 56

1. Konsep Masyarakat tentang Sehat, Sakit dan Penyakit …… 56
2. Kesehatan ……. 57
3. Gizi …….. 58
4. Keluarga Berencana ……. 62
F. Ekonomi Masyarakat 64
1. Aktivitas Penduduk …….. 64
2. Kepemilikan Modal ……. 64
3. Kelembagaan Ekonomi …… 65
4. Harga Barang dan Bahan Makanan ……. 66
5. Potensi dan Peluang Ekonomi …….. 68
6. Tingkat Kesejahteraan …….. 69
G. Keamanan dan Ketertiban 70
1. Kejadian Masalah Keamanan dan Ketertiban …….. 70
2. Penanganan Masalah Keamanan dan Ketertiban …….. 71
H. Kelembagaan Kampung 72
1. Lembaga pemerintah 72
2. Lembaga kemasyarakatan..... 73
3. Lembaga Politik 74
4. Lembaga Kamtibmas 75
I. Sarana dan Prasana 75
1. Transportasi .....…….. 75
2. Air Bersih dan Sanitasi ……. 76
3. Penerangan / Energi ……. 77
4. Pendidikan ……... 77
5. Kesehatan ……. 78
6. Ekonomi ……... 79
7. Peribadatan …….. 80
8. Olahraga dan Rekreasi ……..…….. 81
Bagian IV. **PRIORITAS PEMBANGUNAN KAMPUNG** …….. 82
A. Infrastruktur Kampung Rasa Kota 82
B. Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Lokal 82
C. SDM, Budaya, dan Lingkungan Berkelanjutan 83
Bagian V. **PENUTUP** 85

Daftar Pustaka 86

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Distribusi Penduduk kampung Apuri menurut Umur Tahun 2025..... 35

Tabel 3.2 Distribusi Penduduk kampung Apuri menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 …..... 37

Tabel 3.3 Distribusi Penduduk Kampung Apuri menurut Matapencaharian Tahun 2025 38

Tabel 3.4 Distribusi Penduduk Kampung Apuri menurut Agama Tahun 2025 40

Tabel 3.5 Keadaan Siswa dan Guru SD YPPK St. Fransiskus Xaverius Tahun 2025 ……... 48

Tabel 3.6 Siswa dan Guru SMP YPPK Lecocq D'Armandville Tahun 2025 49

Tabel 3.7 Harga Kebutuhan SEMBAKO, Pakaian dan Sekolah Di Kampung Apuri Tahun 2025 67

Tabel 4.1 Kebutuhan Infrastruktur Kampung Rasa Kota Di Kampung Apuri 82

Tabel 4.2 Kebutuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal Di kampung Apuri 83

Tabel 4.3 Kebutuhan SDM, budaya, dan lingkungan berkelanjutan Di kampung Apuri 84

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Peta Titik Lokasi Kampung Apuri 9

Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Kampung Apuri 72

Gambar 3.2 Struktur BPD Kampung Apuri 73

BAGIAN I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) bagi Provinsi Papua yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, maka kebijakan pembangunan di Tanah Papua mengalami perubahan mendasar. Kebijakan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi Papua, termasuk Kabupaten Mimika, untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara kontekstual dan partisipatif sesuai karakteristik sosial, budaya dan geografis daerah.

Sebagai kelanjutan dari kebijakan Otonomi Khusus tersebut, pemerintah pusat menetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). RIPPP menekankan tiga (3) pilar utama pembangunan yakni "Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif". Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat transformasi pembangunan yang berpihak pada rakyat Papua secara responsive, menyeluruh dan berkelanjutan, dengan mengatasi ketertinggalan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua yang selama ini terjadi secara struktural dan sistemik.

Di Kabupaten Mimika, tantangan pembangunan masih sangat kompleks dan multidimensional. Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih tinggi, terutama antara daerah perkotaan yang relatif maju dengan kampung-kampung di pedalaman dan wilayah pinggiran yang masih tertinggal (dataran pesisir dan pegunungan). Kondisi geografis yang sulit, rendahnya akses terhadap pelayanan dasar, keterbatasan infrastruktur, dan kuatnya keterikatan masyarakat terhadap norma-norma adat dan tradisi lokal turut mempengaruhi lambatnya proses peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan kabupaten Mimika sangat bergantung pada kemampuan memahami potensi dan permasalahan kampung secara lebih mendalam, faktual dan berbasis data yang akurat. Namun hingga saat ini belum tersedia satu basis data kampung yang lengkap, terpadu dan terbarukan yang dapat digunakan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan kampung secara objektif, terukur dan berkelanjutan.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Mimika melalui visi-misi pembangunan tahun 2025-2029 adalah Mewujudkan Mimika yang responsif, energik, transparan, terampil, objektif dan berdaya saing menuju Gerbang Emas (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera), telah menetapkan arah kebijakan "Membangun dari Kampung ke Kota", dengan pendekatan "Membangun Kampung Rasa Kota". Pendekatan ini memprioritaskan pembangunan yang berbasis wilayah, komprehensif, partisipatif dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Salah satu langkah strategis untuk mendukung implementasi pendekatan tersebut adalah menyusun profil dan potensi kampung berbasis kontekstual kampung di kabupaten Mimika.

Dengan adanya basis data kampung yang komprehensif dan selalu diperbarui, Pemerintah Kabupaten Mimika dapat menyelenggarakan pembangunan kampung secara lebih sistematis, terukur dan berkelanjutan. Data ini berfungsi sebagai pijakan teknokratis yang kuat, sekaligus membuka ruang kolaborasi antar-lembaga serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat kampung dalam merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil dan potensi lokal.

Selanjutnya, basis data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media *branding* kampung, sehingga tiap wilayah memiliki ruang untuk menonjolkan keunikan dan potensi khasnya baik dalam aspek ekonomi, sosial-budaya, maupun pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian pembangunan kampung di Kabupaten Mimika tidak hanya sebatas upaya pemerataan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat daya saing lokal yang berakar pada identitas masing-masing kampung.

Melalui kegiatan penyusunan profil dan potensi kampung yang terintegrasi dalam basis data tersebut, diharapkan terbangun pijakan yang kokoh menuju terwujudnya kampung yang mandiri, produktif dan berdaya saing. Upaya ini merupakan bagian dari gerakan besar untuk mewujudkan Kabupaten Mimika sebagai "Gerbang Emas", yakni kabupaten yang sehat, cerdas dan sejahtera, dengan masyarakat serta keluarga yang berkualitas.

B. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan dokumen profil dan potensi kampung ini, adalah:

1. Mengidentifikasi dan memetakan kondisi riil kampung secara menyeluruh, mencakup aspek kependudukan, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan infrastruktur;
2. Menggali potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan sebagai basis ekonomi dan daya saing kampung;
3. Menyediakan data dasar yang akurat dan terintegrasi sebagai bahan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan kampung;
4. Menjadi fondasi untuk pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, berkeadilan dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung.

C. Manfaat

Penyusunan dokumen profil dan potensi kampung ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pemerintah
   a. Penyediaan data akurat dan terpadu berbasis kampung
      Memberikan basis data yang lengkap, mutakhir dan terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan program pembangunan kampung secara obyektif dan terukur.
   b. Perencanaan pembangunan yang tepat sasaran
      Memungkinkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat kampung berdasarkan kondisi dan potensi riil di lapangan.
   c. Penguatan tata kelola pemerintahan kampung
      Meningkatkan kapasitas pemerintah kampung dan distrik dalam menjalankan fungsi administratif, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya secara lebih efisien dan transparan berbasis data
   d. Mempercepat pelaksanaan program strategis daerah dan nasional
      Mendukung pencapaian visi pembangunan daerah 2025-2030 (Gerbang Emas) serta program nasional seperti RIPPP (Papua sehat, cerdas dan produktif) melalui intervensi yang berbasis data dan spasial.
   e. Mendukung sistem monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis bukti

Menyediakan alat ukur dan indikator yang valid untuk memantau capaian pembangunan kampung secara berkala dan berkelanjutan.

2. Masyarakat
   a. Peningkatan akses terhadap program dan layanan publik

      Masyarakat akan lebih mudah teridentifikasi dan terakomodasi dalam program pembangunan karena pemerintah memiliki data yang jelas tentang kondisi dan kebutuhan mereka.

   b. Pemberdayaan berbasis potensi lokal

      Masyarakat akan lebih terdorong mengembangkan potensi kampung (SDA, budaya dan ekonomi lokal) sebagai basis pemberdayaan dan kemandirian.

   c. Partisipasi aktif dalam pembangunan

      Dengan keterlibatan langsung dalam proses pendataan dan pemetaan, masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap pembangunan yang dilakukan.

   d. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan kampung

      Data yang terbuka dan mudah diakses akan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat bagi proses pembangunan dan mendorong kontrol sosial yang sehat.

   e. Percepatan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup

      Dengan adanya intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran, masyarakat akan memperoleh manfaat nyata seperti peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

BAGIAN II. METODOLOGI

Metodologi penyusunan Profil Kampung Apuri dirancang untuk menjamin bahwa data dan informasi yang dihasilkan bersifat akurat, dapat dipertanggungjawabkan, partisipatif, serta relevan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan kampung, distrik dan kabupaten. Pendekatan metodologis ini mengacu pada prinsip perencanaan pembangunan berbasis data, partisipasi masyarakat dan sinkronisasi lintas sektor sesuai kerangka perencanaan Pemerintah Kabupaten Mimika.

A. Pendekatan dan Metode Penyusunan

Penyusunan Profil Kampung Apuri menggunakan metode deskriptif dengan memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi riil kampung, baik dari sisi data objektif maupun dinamika sosial, budaya, kelembagaan, serta potensi sumber daya lokal.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan partisipatif

   Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat kampung sebagai subjek pembangunan melalui pelibatan aktif aparat kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda serta unsur masyarakat lainnya. Pelibatan ini dilakukan dalam proses pengumpulan, klarifikasi dan pembahasan data agar profil kampung mencerminkan kondisi riil dan aspirasi masyarakat.

2. Pendekatan berbasis data primer dan sekunder

   Penyusunan profil kampung memadukan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah kampung, distrik dan perangkat daerah. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kelengkapan, ketepatan serta konsistensi data.

3. Validasi melalui FGD Kampung

   Seluruh data dan informasi yang dihimpun dilakukan proses validasi melalui FGD tingkat kampung sebagai forum klarifikasi, penyepakatan dan penguatan legitimasi data secara sosial dan administratif.

B. Prinsip Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan Profil Kampung Apuri dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Spesifik, yaitu data yang dihimpun mampu menggambarkan indikator pembangunan kampung secara jelas dan terarah sesuai konteks lokal.
2. Dapat dipercaya, yaitu seluruh proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dilakukan secara bertanggung jawab dan terukur agar mencerminkan kondisi sebenarnya.
3. Dapat diukur, yaitu data disusun berdasarkan konsep, definisi, klasifikasi, dan satuan ukuran yang merujuk pada standar yang diakui sehingga memungkinkan perbandingan antar waktu.
4. Relevan, yaitu data yang dikumpulkan memiliki nilai guna langsung bagi perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi pembangunan kampung.
5. Berkelanjutan, yaitu data disusun dengan prinsip pemutakhiran berkala agar Profil Kampung selalu mencerminkan kondisi aktual.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan Profil Kampung Apuri meliputi:

1. Data administrasi kampung, antara lain data kependudukan, kelembagaan kampung, sarana dan prasarana, serta dokumen perencanaan dan laporan kampung.
2. Data Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dari:
   a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
   b. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS)
   c. Data statistik wilayah Kabupaten Mimika dan Distrik Mimika Barat.
3. Observasi lapangan dan wawancara narasumber kunci, yang digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi sosial, budaya, ekonomi, lingkungan serta potensi dan permasalahan kampung yang belum sepenuhnya tercakup dalam data administratif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Data sekunder

   Teknik pengumpulan data dalam penyusunan Profil Kampung Apuri dilaksanakan dengan memanfaatkan data sekunder resmi yang telah tersedia dan terpublikasi resmi, khususnya untuk kebutuhan data dasar kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat.

   Pengumpulan data dilakukan melalui pemanfaatan Data Agregat Kependudukan Semester- I Tahun 2025 yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika**.** Data tersebut digunakan untuk menghimpun informasi mengenai jumlah dan struktur penduduk, karakteristik sosial dasar, tingkat pendidikan, serta indikator kependudukan lainnya yang relevan dengan kebutuhan penyusunan profil kampung.

   Pemanfaatan data sekunder resmi ini dilakukan dengan pertimbangan keterbatasan dan belum optimalnya validitas data hasil pendataan langsung di lapangan. Untuk itu penggunaan data agregat Dukcapil dipandang sebagai sumber data yang paling andal, terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dalam mendukung penyusunan Profil Kampung Apuri.

2. Data primer
   a. Wawancara Mendalam, yang ditujukan kepada informan kunci seperti aparat kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
   b. Focus Group Discussion (FGD), yang melibatkan unsur pemerintah kampung dan perwakilan masyarakat untuk menggali informasi kualitatif, mengidentifikasi isu strategis, serta merumuskan potensi dan kebutuhan prioritas kampung.

Setelah pengumpulan data sekunder dan primer, dilakukan verifikasi silang data sebagai proses pencocokan dan pengecekan data antar sumber, baik antara data lapangan dan data administratif maupun antar OPD, guna memastikan konsistensi dan keandalan data.

E. Teknik Analisis Data

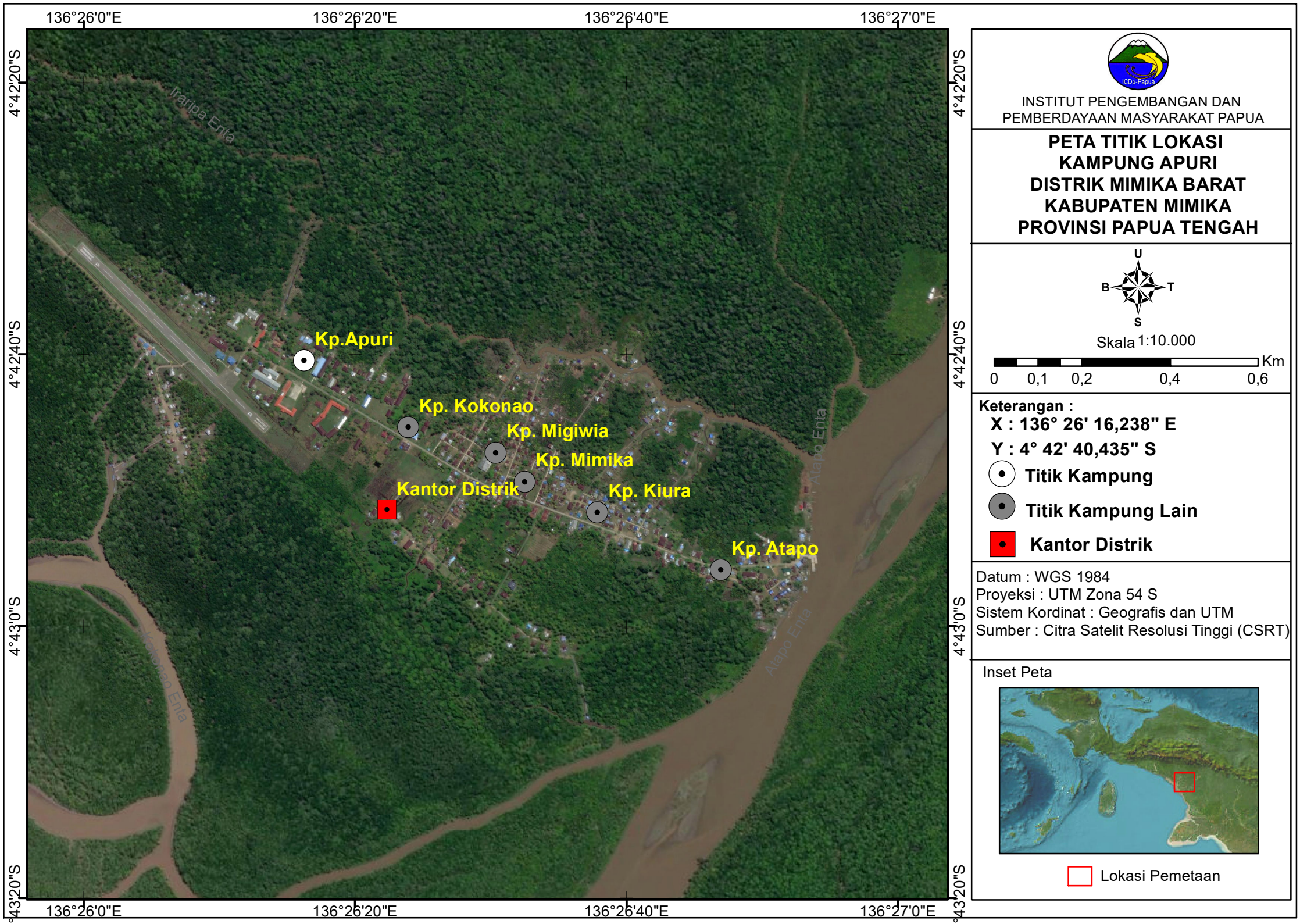
Analisis data dilakukan dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar menghasilkan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai kondisi Kampung Apuri.

Data kuantitatif dianalisis melalui tabulasi dan pengelompokan indikator pembangunan sehingga dapat menggambarkan distribusi, kecenderungan, dan proporsi setiap variabel secara terukur. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif melalui tahapan identifikasi, kategorisasi, dan penafsiran untuk menangkap makna, dinamika sosial, serta konteks lokal yang melatarbelakangi data numerik.

F. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Penyusunan Profil Kampung Apuri dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2025, meliputi tahapan persiapan, pengumpulan data lapangan dan validasi, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan dokumen profil kampung.

Wilayah cakupan penyusunan meliputi wilayah Kampung Apuri, Distrik Mimika Barat, termasuk kawasan permukiman, wilayah pesisir, serta area aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat kampung.



INSTITUT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PAPUA

PETA TITIK LOKASI KAMPUNG APURI DISTRIK MIMIKA BARAT KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH

U
B T
S

Skala 1:10.000

0 0,1 0,2 0,4 0,6 Km

Keterangan :

X : 136° 26' 16,238" E

Y : 4° 42' 40,435" S

Titik Kampung

Titik Kampung Lain

Kantor Distrik

Datum : WGS 1984
Proyeksi : UTM Zona 54 S
Sistem Kordinat : Geografis dan UTM
Sumber : Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT)

Inset Peta

Lokasi Pemetaan

BAGIAN III. PROFIL DAN POTENSI KAMPUNG

A. Keadaan Wilayah Kampung

1. Sejarah

a. Asal-usul kampung

Kampung Apuri terbentuk melalui perjalanan sejarah yang dimulai pada awal tahun 1960-an. Permukiman ini berawal ketika Modestus Takati yang adalah seorang mantri ditugaskan pada puskesmas Kokonao, awalnya tinggal di rumah yang disediakan oleh pemerintah, lalu kemudian pada tahun 1970an Modestus membangun rumah pribadi yang menjadi rumah pertama di kampung Apuri dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Keputusannya untuk membuka tempat tinggal baru menjadi titik awal lahirnya komunitas yang lebih luas. Kehadiran pendiri ini diikuti oleh perpindahan anggota keluarga dan kerabat, sehingga wilayah yang sebelumnya belum dihuni perlahan berkembang menjadi sebuah permukiman yang semakin mantap dan diakui keberadaannya.



Pintu Gerbang Kampung Apuri (dok.ippm)

Pertumbuhan Kampung Apuri tidak terlepas dari arus perpindahan penduduk dari beberapa kampung lain di Distrik Mimika Barat Tengah. Warga yang kini tinggal di Apuri berasal dari Akar, Mapar, Pronggo dan Mipia. Sebelum memilih menetap di Apuri, banyak di antara mereka berprofesi sebagai guru, tenaga kesehatan, serta anggota TNI dan Polri yang ditugaskan di Kampung Kokonao. Mobilitas kerja inilah yang kemudian mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dan mendorong terbentuknya ikatan sosial yang pada akhirnya menciptakan komunitas baru di Apuri.

Motif pembentukan kampung ini tidak hanya didorong oleh kebutuhan untuk bermukim, tetapi juga oleh hubungan kekeluargaan, keinginan untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih strategis, serta keputusan adat. Perkembangan permukiman yang pesat dan hubungan sosial yang harmonis mendapat dukungan dari para tetua adat pemilik hak ulayat Kampung Mimika. Sebagai wujud

penghargaan dan rasa terima kasih atas kontribusi masyarakat Apuri, para tetua adat memberikan izin untuk menempati sebagian wilayah ulayat mereka. Pemberian izin tersebut kemudian diperkuat lagi setelah pemekaran wilayah pada tahun 2014, ketika masyarakat Kokonao secara resmi memperbolehkan warga Apuri untuk memanfaatkan sumber daya alam di kawasan hutan, sungai dan laut.

Secara administratif, Apuri awalnya berada dalam pemerintahan Kampung Kokonao. Namun, pada tahun 2014 dilakukan pemekaran yang menghasilkan dua kampung, yaitu Kokonao dan Apuri. Pemekaran ini menandai pengakuan resmi terhadap Apuri sebagai kampung mandiri. Setelah pemekaran tersebut, masyarakat memilih Teodorus Takati sebagai kepala kampung pertama yang memimpin pada periode 2014–2019. Kepemimpinan ini menjadi fase awal tata kelola pemerintahan kampung yang lebih terarah dan membuka ruang bagi pembangunan kelembagaan serta kesejahteraan masyarakat.

Seiring waktu, identitas Apuri semakin menguat, termasuk melalui penamaan kampung. Nama "Apuri" berasal dari bahasa lokal yang digunakan oleh masyarakat Mimika. Nama ini tetap dipertahankan dari masa ke masa dan menjadi penanda identitas kolektif warga. Melalui nama tersebut, masyarakat Apuri menegaskan sejarah, asal-usul, serta kedekatan mereka dengan tanah adat tempat mereka bermukim.

Perkembangan kampung berlanjut hingga tahun 2019, ketika kampung Apuri menjadi salah satu lokasi implementasi Program USAID LESTARI. Program ini memberikan pendampingan penyusunan RPJMK dan membentuk kelompok perlindungan hutan, yang bertujuan memperkuat pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola kampung.

Seluruh rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Kampung Apuri merupakan hasil dari dinamika migrasi, dukungan adat, pengakuan pemerintah, serta proses sosial yang berlangsung secara bertahap. Dari sebuah permukiman kecil yang dibuka oleh dua tokoh pendiri, Apuri berkembang menjadi kampung yang memiliki identitas, struktur pemerintahan, dan arah pembangunan yang jelas.

b. Struktur sosial awal

Sejarah awal terbentuknya Kampung Apuri tidak terlepas dari peran marga perintis yang menjadi fondasi lahirnya permukiman tersebut. Kehadiran marga Takati sebagai pendatang pertama membentuk dasar ikatan kekerabatan yang kemudian melebar melalui hubungan keluarga, pernikahan, serta perpindahan kerabat dari berbagai kampung di Distrik Mimika Barat Tengah. Dari jaringan kekerabatan inilah komunitas Apuri tumbuh menjadi kelompok yang terikat bukan hanya oleh garis keturunan, tetapi juga oleh rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk membangun permukiman baru. Hubungan-hubungan tersebut menjadi perekat sosial yang menguatkan keberlangsungan hidup masyarakat sejak masa awal hingga saat ini.

Dalam fase awal pembentukan komunitas, struktur kepemimpinan adat berperan penting dalam mengatur kehidupan sosial. Para tetua dari marga perintis berfungsi sebagai pemegang otoritas adat, yang menjalankan peran setara kepala suku atau kepala marga dalam tradisi lokal. Mereka mengatur pembagian lahan, menyelesaikan perselisihan, serta memandu masyarakat dalam menjaga hubungan baik dengan pemilik hak ulayat dari Kampung Mimika. Di samping itu, kehadiran tokoh agama dari kalangan pendatang turut memperkuat nilai moral dan tata kehidupan komunitas. Kepemimpinan adat dan religius ini secara bersama-sama membentuk tatanan sosial yang stabil, sehingga penduduk Apuri memiliki pedoman yang jelas dalam mengatur kehidupan sehari-hari sebelum adanya struktur pemerintahan kampung secara formal.

Pada masa awal keberadaannya, pola pemukiman di Apuri berkembang secara alami mengikuti kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Rumah-rumah dibangun berkelompok berdasarkan kedekatan kekerabatan, membentuk pola permukiman tradisional yang memudahkan mereka bekerja sama dan saling menjaga. Sistem hidup masyarakat di tahap awal bergantung pada aktivitas berburu, meramu, serta berkebun di lahan-lahan yang tersedia. Kegiatan ini menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan pangan sebelum berkembangnya pola ekonomi yang lebih kompleks. Praktik hidup tersebut tidak hanya mencerminkan cara bertahan masyarakat pada masa itu, tetapi juga menjadi dasar hubungan mereka dengan alam, yang kemudian dihargai dan diperkuat melalui izin adat dan pengelolaan

sumber daya alam setelah Kampung Apuri berkembang dan diakui secara administratif.

c. Perkembangan kampung dari masa ke masa

Perjalanan hidup masyarakat Apuri memperlihatkan peningkatan kapasitas penduduk yang berlangsung seiring perubahan budaya yang mereka alami dari masa ke masa. Pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang mendorong berkembangnya kemampuan masyarakat dalam mengelola kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan kampung. Penduduk yang awalnya mengandalkan tradisi dan pengetahuan lokal perlahan memperoleh akses terhadap pendidikan formal, baik melalui sekolah yang dibangun pemerintah maupun melalui para guru yang lebih dulu bertugas di Kokonao. Peningkatan literasi, keterampilan kerja, serta pemahaman terhadap tata kelola kampung turut mengubah pola pikir masyarakat, dari pola tradisional yang berbasis kebergantungan pada sumber daya alam menuju pola hidup yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan.

Transformasi budaya masyarakat Apuri tidak dapat dilepaskan dari pengaruh eksternal yang hadir sejak awal pembentukan permukiman. Keberadaan misi gereja membawa pengaruh besar dalam pembentukan nilai moral, tata laku sosial, serta penyebaran pendidikan dasar. Para misionaris tidak hanya memperkenalkan ajaran keagamaan, tetapi juga membuka ruang interaksi baru melalui sekolah dan kegiatan pelayanan masyarakat. Pada tahap berikutnya, kehadiran pemerintah memperkuat proses modernisasi melalui administrasi kampung, pelayanan kesehatan, serta pembangunan sarana transportasi. Berbagai intervensi ini memperluas wawasan masyarakat terhadap dunia luar dan memperkaya budaya lokal tanpa menghilangkan identitas adat yang menjadi dasar kehidupan mereka.

Dalam sejarah perkembangannya, masyarakat Apuri mengalami beberapa peristiwa penting yang turut membentuk struktur sosial dan ruang hidup mereka. Pemekaran kampung pada tahun 2014 menjadi salah satu momentum utama yang memberi kesempatan bagi Apuri untuk mengelola wilayahnya secara mandiri. Seiring dengan itu, berbagai program pemerintah mulai diarahkan ke kampung, termasuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan kampung, fasilitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2019, masuknya Program USAID LESTARI memberikan kontribusi besar dalam penguatan kapasitas masyarakat

melalui pendampingan revisi RPJMK dan pembentukan kelompok perlindungan hutan. Serangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana Apuri berkembang dari permukiman kecil menjadi kampung dengan struktur kelembagaan yang lebih kuat dan arah pembangunan yang semakin jelas.

Perubahan sosial dan hadirnya berbagai aktor eksternal turut mendorong transformasi ekonomi masyarakat. Jika pada masa awal mereka masih bergantung pada pola hidup subsisten melalui berburu, meramu, serta berkebun—kini aktivitas ekonomi berkembang menuju pola campuran yang melibatkan pertanian, perdagangan, dan jasa. Sebagian penduduk mulai memanfaatkan peluang ekonomi baru, seperti menjual hasil kebun, menyediakan jasa transportasi lokal, atau bekerja pada sektor pelayanan publik. Kehadiran pasar dan aktivitas perdagangan kecil membuka ruang bagi pertukaran barang dan jasa, sekaligus meningkatkan interaksi ekonomi antara Apuri dan kampung lain di sekitarnya. Perubahan ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi, memanfaatkan peluang, serta membangun fondasi ekonomi kampung yang lebih dinamis.

d. Nilai dan kearifan lokal

Norma adat dan praktik budaya menjadi landasan penting bagi masyarakat Apuri sejak masa awal pembentukannya. Nilai-nilai adat yang diwariskan oleh marga perintis mengatur hubungan antarkeluarga, tata cara bermukim, serta etika sosial yang harus dijaga oleh setiap anggota komunitas. Ritual budaya yang dilakukan pada momen-momen tertentu—seperti pengukuhan pemimpin adat, penyambutan keluarga baru, atau kegiatan syukur panen—mencerminkan keterikatan masyarakat pada tradisi leluhur. Dalam struktur sosial tradisional, kepemimpinan dijalankan oleh tokoh adat dari marga perintis yang memegang peranan serupa kepala marga atau pemimpin suku. Mereka bertugas menjaga tatanan sosial, menegakkan norma adat, serta memastikan setiap keputusan penting dilakukan melalui musyawarah. Struktur ini berjalan harmonis dan menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat jauh sebelum hadirnya pemerintahan kampung secara formal.

Tokoh adat menjalankan peran strategis dalam membina komunitas Apuri, terutama pada masa awal perkembangan kampung ketika aturan formal belum terbentuk. Para tetua dari marga Takati maupun menjadi rujukan utama dalam

penyelesaian konflik, penentuan batas permukiman, dan tata cara berinteraksi dengan pemilik hak ulayat dari Kampung Mimika. Ketika misi gereja mulai hadir di wilayah tersebut, tokoh agama turut memperkaya dinamika sosial dengan memperkenalkan nilai moral dan pendidikan dasar. Kolaborasi antara pemimpin adat dan rohaniwan menjadikan perubahan sosial yang terjadi di Apuri berlangsung tanpa menghilangkan identitas budaya. Pengaruh keduanya terlihat jelas dalam kebiasaan masyarakat menyelesaikan persoalan secara damai, membangun solidaritas, serta menjaga keselarasan antara adat dan ajaran keagamaan.

Kearifan tradisional masyarakat Apuri juga tercermin dalam cara mereka mengelola lingkungan dan menjaga hubungan sosial. Pembagian tanah ulayat dilakukan melalui persetujuan tokoh adat dan pemilik hak wilayah, sehingga setiap keluarga yang bermukim di Apuri memperoleh akses yang adil terhadap lahan untuk berkebun, membangun rumah, atau memanfaatkan hasil hutan. Pengelolaan sungai dan kawasan hutan mengikuti aturan tradisional yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian, suatu praktik yang kemudian diperkuat dengan masuknya program perlindungan hutan pada tahun 2019. Tradisi gotong royong menjadi ciri khas kehidupan sosial masyarakat, diwujudkan dalam pembangunan rumah, pembuatan jalan kampung, atau kegiatan adat bersama. Keseluruhan sistem ini berperan penting dalam mempertahankan kohesi sosial dan memastikan bahwa perkembangan Kampung Apuri berlangsung selaras dengan nilai adat serta pengalaman sejarah yang membentuk komunitas sejak awal keberadaannya.

e. Identitas kampung saat ini

Ciri khas masyarakat Apuri tercermin kuat melalui penggunaan bahasa lokal yang menjadi identitas komunikasi sekaligus penanda ikatan sosial antarwarga. Bahasa ini bukan sekadar alat berinteraksi, namun juga medium pewarisan nilai, cerita leluhur, dan kosmologi yang dipahami kolektif. Tarian tradisional yang berkembang menampilkan gerak ritmis yang menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dan alam, sementara makanan khas seperti hidangan berbahan sagu, ubi lokal, dan hasil perburuan menjadi representasi cara hidup yang sejak lama berbasis pada ketersediaan sumber daya alam setempat. Simbol budaya yang tampak dalam ornamen rumah, benda-benda upacara, atau motif anyaman

memperlihatkan kedalaman estetika lokal yang telah terbentuk sejak masa para marga perintis.

Jika kampung memiliki motto atau semboyan, biasanya tertanam dalam ungkapan yang menekankan kebersatuan, ketahanan, dan penghormatan terhadap leluhur. Semboyan semacam ini tidak hanya menjadi tagline identitas, tetapi juga pedoman moral yang memandu gaya hidup komunitas Apuri dalam menghadapi perubahan. Nilai-nilai tersebut berakar dari pengalaman sejarah panjang masyarakat yang pernah melalui fase pemukiman tradisional, penetrasi pengaruh eksternal, hingga dinamika relokasi dan pembangunan. Dengan demikian, semboyan kampung berfungsi sebagai kompas budaya yang menjaga kontinuitas jati diri di tengah arus transformasi.

Arah perkembangan terbaru di Kampung Apuri menunjukkan upaya kolektif untuk menyeimbangkan tradisi dengan inovasi. Masuknya pendidikan formal, semakin terbukanya akses ekonomi, serta hadirnya fasilitas publik modern telah memperluas wawasan masyarakat, namun tidak menghapus nilai dasar yang selama ini menjadi fondasi sosial. Identitas budaya tetap dipelihara melalui festival kampung, revivalisasi tarian dan bahasa lokal, serta pelestarian kuliner tradisional. Masyarakat Apuri kini bergerak menuju karakter kampung yang lebih adaptif, terbuka pada peluang baru, namun tetap memegang teguh warisan leluhur sebagai inti identitas komunal mereka.

2. Keadaan Wilayah

a. Letak geografis

Kampung Apuri merupakan salah satu kampung yang berada di wilayah Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika, dengan lokasi geografis yang menempatkannya di kawasan pesisir yang strategis. Posisi kampung ini berdekatan langsung dengan Kampung Kokonao yang berada dalam distrik yang sama, sehingga tercipta hubungan sosial dan mobilitas antar warga yang cukup intens. Lingkungan pesisir yang menjadi pusat pemukiman masyarakat Apuri membentuk karakter ruang hidup yang khas, sekaligus mempengaruhi pola aktivitas ekonomi dan sosial mereka sejak masa awal.

Akses menuju Kampung Apuri umumnya ditempuh melalui jalur perairan. Dari Pelabuhan Pomako, perjalanan menuju Apuri dapat dilakukan dengan

menggunakan speedboat atau perahu bermotor melalui rute sungai maupun laut. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 2-3 jam, bergantung kondisi cuaca dan arus perairan, sehingga aksesibilitas kampung tetap bergantung pada faktor alam yang memengaruhi rute transportasi. Jalur ini menjadi nadi utama yang menghubungkan Apuri dengan wilayah Timika dan kawasan pesisir lain di sekitarnya.

Selain melalui jalur laut dan sungai, Kampung Apuri juga dapat dicapai dengan transportasi udara. Pesawat kecil jenis Caravan menghubungkan Bandara Udara Mozez Kilangin Timika dengan Bandar Udara Kokonao, yang berjarak tempuh sekitar 20 menit penerbangan. Kehadiran jalur udara ini merupakan alternatif penting bagi mobilitas masyarakat, terutama untuk keperluan mendesak maupun kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Kombinasi akses darat–laut–udara tersebut memperlihatkan bahwa meskipun Apuri berada di kawasan pesisir yang relatif terpencil, kampung ini tetap terhubung dengan pusat aktivitas di Kota Timika melalui berbagai moda transportasi yang tersedia.



Bandara Kokonau di Apuri (dok.ippm)

Adapun batas wilayah administratif wilayah Kampung Apuri sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Timika
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kokonao
- Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Amar

b. Luas wilayah dan pembagian zona

Dengan total luas sekiat 108,25 kilometer persegi Kampung Apuri memiliki tata ruang wilayah yang terbentuk secara alami melalui sejarah pemukiman masyarakatnya, sekaligus dipengaruhi oleh kondisi geografis pesisir Mimika Barat. Pembagian ruang ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga menunjukkan kearifan lokal dalam mengelola lingkungan serta menjaga keseimbangan antara aktivitas manusia dan keberlanjutan alam.

Zona pemukiman menjadi pusat kehidupan masyarakat, berlokasi di kawasan pesisir yang relatif datar dan aman dari pasang surut ekstrem. Di wilayah inilah rumah-rumah penduduk, fasilitas umum, serta pusat kegiatan sosial dan keagamaan

dibangun. Penataan ruang permukiman berlangsung mengikuti pola adaptif terhadap lingkungan, bangunan dibuat sedikit terangkat mengantisipasi kondisi tanah yang lembap dan fluktuasi permukaan air. Zona ini sekaligus berfungsi sebagai ruang interaksi sosial, tempat berlangsungnya musyawarah, kegiatan adat dan aktivitas keseharian yang memperkuat hubungan antar keluarga dan marga.

Zona pertanian berada di wilayah yang lebih ke pedalaman, memanfaatkan tanah yang lebih stabil dan memiliki kesuburan cukup untuk kegiatan berkebun. Di area ini masyarakat menanam berbagai tanaman pangan seperti sagu, umbi-umbian, pisang, dan sayur-sayuran. Meskipun sebagian besar aktivitas ekonomi masih dipengaruhi karakter pesisir, kegiatan berkebun tetap menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Pola bercocok tanam dilakukan secara tradisional dengan memperhatikan siklus musim, ketersediaan air serta aturan adat mengenai batas-batas penggunaan lahan.

Di luar zona pertanian terbentang kawasan hutan, rawa, dan perairan yang secara turun-temurun menjadi bagian dari tanah ulayat. Zona hutan berfungsi sebagai sumber kayu, bahan bangunan, obat-obatan alami, serta tempat berburu satwa kecil. Rawa dan perairan, termasuk sungai dan muara, merupakan ruang penting bagi aktivitas mencari ikan, kepiting, dan hasil laut lainnya yang menjadi penopang ekonomi utama penduduk pesisir. Pengelolaan seluruh kawasan ini mengikuti aturan adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, termasuk larangan mengambil hasil alam di area tertentu pada waktu-waktu tertentu. Tanah ulayat menjadi dasar legitimasi pengelolaan ruang, di mana setiap marga memiliki batas wilayah yang diakui bersama dan dihormati oleh seluruh komunitas. Struktur penataan ruang ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Apuri memadukan kebutuhan hidup modern dengan sistem kearifan lokal yang menjaga keberlanjutan lingkungan serta keseimbangan sosial.

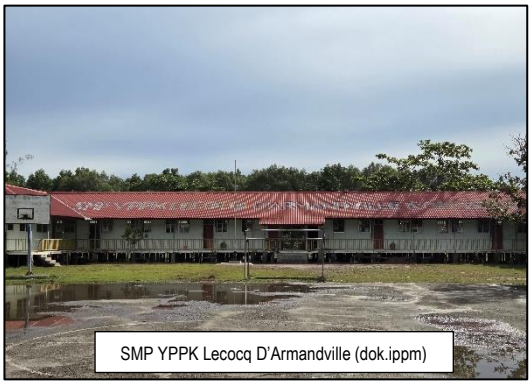
Penggunaan lahan di Kampung Apuri terbentuk melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat, kondisi geografis pesisir, serta perkembangan sosial budaya. Penataan ruang ini tidak hanya mencerminkan fungsi-fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mengandung nilai historis dan adat yang mengatur bagaimana masyarakat memanfaatkan dan menjaga lingkungan mereka.

Zona perumahan menjadi inti penggunaan lahan dan terletak di kawasan pesisir yang relatif stabil. Rumah-rumah dibangun mengikuti pola linear atau berkelompok, menyesuaikan kontur tanah serta arah angin laut. Struktur bangunan umumnya dibuat sedikit terangkat untuk menghindari kelembapan tinggi. Penempatan rumah tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan ruang sosial yang lebih luas, menciptakan lingkungan permukiman yang saling terkait dan memudahkan interaksi antarwarga.

Di sekitar permukiman terdapat area kebun yang menjadi pendukung utama kehidupan sehari-hari. Lahan ini digunakan untuk menanam tanaman pangan seperti sagu, pisang, keladi, dan berbagai sayuran. Lokasinya dipilih berdasarkan ketersediaan tanah yang subur dan dekat dengan sumber air. Kegiatan berkebun dilakukan secara tradisional dengan memperhatikan siklus alam serta aturan adat yang mengatur pemanfaatan lahan secara arif.

Penggunaan lahan untuk fasilitas umum menjadi bagian penting dari perkembangan kampung. Ruang ini mencakup balai kampung, pos pelayanan kesehatan, area pertemuan masyarakat, serta titik-titik akses air bersih. Fasilitas umum ini berfungsi sebagai pusat pelayanan dasar sekaligus tempat berlangsungnya kegiatan kemasyarakatan, seperti musyawarah, pelatihan, atau kegiatan pemberdayaan.

Tempat ibadah baik gereja maupun fasilitas keagamaan lainnya menempati posisi strategis di tengah pemukiman. Keberadaannya mencerminkan peran penting agama dalam kehidupan sosial masyarakat Apuri. Ruang ibadah tidak hanya digunakan untuk kegiatan rohani, tetapi juga menjadi simpul penguatan moral, solidaritas, dan nilai kebersamaan.



SMP YPPK Lecocq D'Armandville (dok.ippm)

Sekolah merupakan bagian lain dari penggunaan lahan yang mencerminkan perhatian terhadap pendidikan generasi muda. Lokasinya dipilih agar mudah dijangkau warga, sekaligus menjadi pusat kegiatan belajar dan aktivitas anak-anak. Lingkungan sekolah turut

berfungsi sebagai ruang interaksi bagi berbagai kegiatan sosial, seperti pertemuan orang tua, kegiatan budaya, atau pelatihan masyarakat.

Selain itu terdapat lapangan terbuka sebagai ruang terbuka publik yang digunakan untuk olahraga, perayaan adat, kegiatan keagamaan terbuka, maupun acara kampung, juga memainkan peran penting sebagai ruang sosial yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat, memperkuat rasa kebersamaan, dan menjadi tempat berlangsungnya aktivitas membangun karakter komunitas.

Secara keseluruhan, penggunaan lahan di Kampung Apuri menggambarkan harmonisasi antara kebutuhan hidup modern, struktur sosial tradisional, serta adaptasi lingkungan pesisir. Tata ruang yang terbentuk tidak hanya mendukung keberlangsungan aktivitas masyarakat, tetapi juga memperlihatkan nilai kebersamaan dan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.

c. Kondisi topografi dan geomorfologi

Bentuk lahan Kampung Apuri didominasi oleh dataran rendah yang berada di kawasan pesisir dan berdekatan dengan aliran sungai. Kondisi geografis ini menjadikan permukaan tanah relatif landai dengan variasi elevasi yang sangat kecil. Kemiringan lahan umumnya mendekati nol hingga lereng sangat landai, sehingga seluruh kawasan dapat dimanfaatkan sebagai area permukiman dan kegiatan masyarakat, meskipun ketinggiannya hanya sedikit di atas permukaan air laut. Kedekatan wilayah dengan garis pantai dan sungai memberikan karakter ekologis yang khas sekaligus menentukan pola aktivitas harian penduduk.

Ciri fisik tersebut menjadikan Apuri memiliki potensi kerawanan bencana yang perlu diperhatikan. Risiko banjir cukup tinggi, terutama ketika curah hujan meningkat atau terjadi luapan dari sungai yang berada di sekitar permukiman. Selain itu, kawasan pesisir membuat kampung rentan terhadap gelombang pasang, yang pada saat tertentu dapat membawa air laut masuk hingga mendekati area pemukiman. Di bagian tepi sungai, masyarakat juga menghadapi ancaman abrasi, yang secara perlahan mengikis lahan dan dapat mengganggu stabilitas bangunan di sekitarnya. Kombinasi ketiga potensi bencana ini mencerminkan pentingnya pengelolaan lingkungan dan penataan ruang yang adaptif terhadap kondisi alam setempat.

d. Iklim dan kondisi alam

Kampung Apuri berada pada kawasan pesisir dataran rendah dengan tipe iklim tropis basah hingga sangat basah, mengikuti pola umum iklim di Distrik Mimika Barat. Sepanjang tahun, wilayah ini mengalami dua musim utama, yaitu musim kemarau pada Januari hingga Mei dan musim hujan pada Juni hingga Desember. Kelembapan udara yang tinggi serta curah hujan yang relatif merata menjadikan lingkungan Apuri selalu lembap dan mendukung pertumbuhan ekosistem pesisir khas Papua. Berdasarkan kecenderungan iklim wilayah pesisir Mimika, rata-rata curah hujan berada pada kisaran ±500 mm per bulan, dengan suhu stabil antara 22-30°C. Kondisi ini membuat Kampung Apuri memiliki potensi ekologis tinggi, baik pada wilayah daratan maupun perairan sekitarnya.

Pada periode musim hujan, Kampung Apuri kerap menghadapi cuaca ekstrem, terutama akibat pengaruh pasang laut dan keberadaan sungai yang mengalir di sekitar permukiman. Banjir genangan sering terjadi pada kawasan permukiman rendah, area rawa dan wilayah yang berdekatan dengan alur sungai, terutama ketika hujan deras bersamaan dengan pasang tinggi dan angin kuat yang umum terjadi pada pertengahan hingga akhir tahun. Pada masa peralihan musim, angin dari arah laut dapat bertiup cukup kencang sehingga memengaruhi aktivitas melaut serta mobilitas masyarakat yang bergantung pada transportasi air. Pola cuaca seperti ini telah membentuk kemampuan masyarakat Apuri untuk beradaptasi melalui pemilihan lokasi tempat tinggal serta penyesuaian pola pemanfaatan sumber daya alam.

Iklim yang lembap dan sangat basah tersebut juga menjadi penopang utama sumber daya alam yang menghidupi masyarakat Kampung Apuri. Hutan sagu tumbuh subur di wilayah rawa-rawa dan menjadi sumber pangan pokok sekaligus bagian penting dari budaya lokal. Di area pesisir, hutan mangrove berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi serta menyediakan sumber penghidupan seperti kepiting bakau, kerang, tambelo, dan biota pesisir lainnya. Sungai-sungai besar di sekitar kampung tidak hanya menjadi jalur transportasi tradisional, tetapi juga menyediakan beragam hasil perikanan air tawar, termasuk ikan dan udang yang menjadi bagian penting dalam konsumsi harian masyarakat. Kombinasi curah hujan tinggi, ekosistem pesisir yang lengkap, dan kondisi iklim yang stabil menjadikan

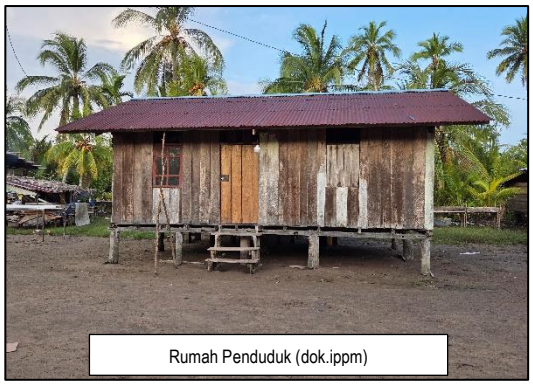
Kampung Apuri sebagai wilayah dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah serta sangat menentukan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

B. Keadaan Perumahan

1. Tipe dan kondisi bangunan rumah

Permukiman di Kampung Apuri dibentuk oleh karakter geografis pesisir dan kawasan rawa-sungai yang menuntut masyarakat untuk menyesuaikan pola bangunan dengan kondisi alam. Lingkungan yang lembap, genangan air, serta dinamika pasang surut menjadikan rumah-rumah di Apuri dibangun dengan struktur yang mampu bertahan pada tanah yang tidak stabil. Karena itu, jenis bangunan di kampung ini umumnya terbagi menjadi dua kategori, yakni rumah semi permanen dan rumah non permanen atau tradisional. Rumah semi permanen menggunakan konstruksi yang lebih kuat dan tahan lama sebagai respons terhadap kebutuhan hunian yang stabil, sedangkan bangunan tradisional tetap dipertahankan oleh sebagian keluarga sebagai wujud kesinambungan adat dan pemanfaatan bahan lokal.

Material bangunan yang digunakan masyarakat Apuri mencerminkan perpaduan antara kearifan lokal dan perkembangan material modern. Dinding rumah kebanyakan dibuat dari kayu atau papan yang mudah diperoleh dan cocok untuk lingkungan tanah rawa. Atap seng kini lebih banyak digunakan karena ketahanannya terhadap cuaca dan curah hujan tinggi, meskipun beberapa warga masih memanfaatkan rumbia sebagai pilihan alami yang memberikan kesejukan. Sebagian besar rumah dibangun dengan lantai papan yang ditinggikan dari permukaan tanah untuk meminimalkan risiko kelembapan dan mengantisipasi banjir pasang yang kerap terjadi di wilayah pesisir.


Rumah Penduduk (dok.ippm)

Dari sisi kelayakan fisik, bangunan di Kampung Apuri bervariasi mulai dari kategori layak huni hingga rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Rumah darurat yang dibangun secara sederhana umumnya berada pada kategori rusak berat

karena tidak memiliki struktur yang cukup kuat untuk menghadapi kondisi lingkungan pesisir. Saat ini pemerintah kabupaten telah menjalankan program bantuan pembangunan rumah yang bertujuan menggantikan hunian tidak layak, sehingga secara bertahap kondisi permukiman masyarakat dapat meningkat menjadi lebih aman dan nyaman.

Kepadatan hunian di Kampung Apuri memperlihatkan pola permukiman yang mengikuti badan jalan utama dan jalur-jalur kampung. Konsentrasi bangunan di sepanjang jalur tersebut mencerminkan pertumbuhan kampung yang berorientasi pada aksesibilitas dan kedekatan dengan fasilitas umum. Dalam praktiknya, sebagian rumah dihuni oleh dua hingga tiga kepala keluarga karena anak-anak yang telah menikah belum memiliki rumah sendiri. Pola hunian multigenerasi ini menggambarkan kuatnya hubungan kekerabatan dalam masyarakat Apuri, sekaligus menunjukkan kebutuhan yang semakin meningkat terhadap penyediaan hunian baru seiring bertambahnya jumlah penduduk.

2. Pola permukiman

Pola permukiman di Kampung Apuri menunjukkan tatanan ruang yang terbentuk secara alami dan menyesuaikan kondisi lingkungan setempat. Secara umum, hunian warga berpusat pada satu titik utama yang menjadi kawasan inti aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kawasan pusat ini kemudian berkembang ke arah luar mengikuti kebutuhan ruang dan pertumbuhan jumlah penduduk.

Selain bersifat terpusat, permukiman juga mengikuti jalur jalan yang membentang di kawasan kampung. Jalur transportasi tersebut berfungsi sebagai koridor utama yang menghubungkan berbagai bagian kampung, sehingga rumah-rumah warga cenderung dibangun berderet di sepanjang jalur tersebut untuk memudahkan mobilitas dan akses layanan dasar.

Secara administratif, permukiman tersebar di dalam lima Rukun Tetangga (RT). Pembagian ini mencerminkan penyebaran hunian yang relatif merata, meskipun secara fisik tetap berada dalam satu kawasan kompak. Karakteristik lain yang tampak adalah jarak antarrumah yang sangat berdekatan, menunjukkan kepadatan permukiman yang cukup tinggi serta keterbatasan ruang untuk pengembangan horizontal.

Kedekatan hunian ini juga terkait dengan posisi fasilitas umum, terutama jaringan jalan dan landasan pacu pesawat yang menjadi prasarana vital bagi aktivitas masyarakat. Banyak rumah berada tidak jauh dari kedua fasilitas tersebut karena fungsinya yang penting bagi konektivitas kampung dengan wilayah lain serta pergerakan barang dan orang.

Secara keseluruhan, pola permukiman Kampung Apuri menampilkan susunan ruang yang kompak, terintegrasi dengan jalur transportasi, dan menyesuaikan kedekatan terhadap fasilitas umum yang mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat.

3. Kepemilikan rumah

Kepemilikan rumah di Kampung Apuri menunjukkan variasi berdasarkan kondisi sosial dan kemampuan ekonomi masyarakat. Sebagian besar warga menghuni rumah milik sendiri, baik yang dibangun secara bertahap maupun melalui hasil swadaya keluarga. Selain itu, terdapat pola menumpang, terutama pada keluarga di mana anak yang telah menikah masih tinggal bersama orang tua karena keterbatasan lahan atau belum memiliki rumah mandiri. Pola ini memperlihatkan kuatnya ikatan kekerabatan serta budaya tinggal bersama dalam satu lingkungan keluarga.

Di samping hunian swadaya, sejumlah rumah merupakan bantuan pemerintah, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), PNPM, serta dukungan dari dana desa. Program tersebut membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat dengan memperbaiki rumah yang tidak layak huni atau membangun hunian baru bagi keluarga berpenghasilan rendah. Dalam konteks budaya setempat, tidak adanya rumah adat menjadikan bentuk hunian lebih banyak mengikuti pola konstruksi modern sederhana yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing keluarga.

4. Luas bangunan dan jumlah kamar

Luas bangunan rumah di Kampung Apuri umumnya setara dengan tipe 21. Meskipun ukuran bangunan relatif seragam, luas lahan tempat rumah berdiri sangat bervariasi. Rumah yang berada di dekat jalan utama cenderung tidak memiliki halaman karena keterbatasan ruang dan tingginya kepadatan hunian di area tersebut.

Sebaliknya, rumah yang letaknya lebih jauh dari jalan utama biasanya memiliki lahan kosong di sekitarnya, meskipun pemanfaatannya tidak selalu optimal dan sangat bergantung pada kebutuhan keluarga.

Dari segi tata ruang, sebagian besar rumah memiliki dua kamar tidur, satu ruang tamu, dan dapur yang terletak terpisah dari bangunan utama. Penempatan dapur di luar biasanya bertujuan untuk mengurangi risiko kebakaran dan menjaga kebersihan ruang dalam rumah. Untuk kebutuhan sanitasi, kamar mandi dan MCK masih bervariasi; beberapa keluarga menggunakan fasilitas darurat yang dibuat secara sederhana, sementara yang memiliki bangunan permanen seringkali tidak terawat dengan baik. Kondisi ini menggambarkan keterbatasan sarana sanitasi dan perlunya peningkatan kualitas fasilitas dasar bagi masyarakat setempat.

5. Ketersediaan fasilitas dasar rumah tangga

Akses air bersih di Kampung Apuri bergantung pada beberapa sumber yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Sebagian besar keluarga memanfaatkan bak penampungan air hujan sebagai sumber utama, terutama pada musim penghujan. Selain itu, terdapat sumur galian yang kualitas airnya sangat dipengaruhi oleh kondisi pasang surut, sehingga tidak selalu dapat digunakan sepanjang waktu. Ketika kebutuhan meningkat atau sumber tersebut tidak mencukupi, warga mengambil air dari sungai terdekat, meskipun kualitasnya tidak selalu ideal untuk konsumsi.


Sumur air bersih (dok.ippm)

Sistem sanitasi masyarakat masih menunjukkan keterbatasan dalam penyediaan fasilitas yang layak. Umumnya, setiap keluarga memiliki jamban yang terletak terpisah dari rumah, dengan sebagian menggunakan septic tank sederhana. Namun, masih ditemukan jamban tidak sehat yang belum memenuhi standar kebersihan dasar, sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Dalam hal penerangan, 95% masyarakat sudah memanfaatkan listrik PLN dengan sistem token, tetapi pasokan listrik yang belum stabil menyebabkan warga harus menggunakan lampu minyak ketika terjadi pemadaman.

Pengelolaan sampah dan sistem drainase di kawasan permukiman menunjukkan kondisi yang perlu mendapat perhatian serius. Sampah rumah tangga sebagian besar dibakar atau dibuang secara sembarangan karena belum tersedia sistem pengelolaan yang terorganisasi. Selain itu, ketiadaan saluran drainase rumah menyebabkan air hujan sulit mengalir dengan baik dan memicu genangan di sekitar rumah, terutama saat curah hujan tinggi. Kondisi ini memperlihatkan perlunya peningkatan prasarana dasar untuk mendukung lingkungan permukiman yang lebih sehat dan layak huni.

6. Kondisi lingkungan permukiman

Kondisi kebersihan lingkungan di sekitar rumah warga Kampung Apuri menunjukkan bahwa pemeliharaan ruang luar masih sangat terbatas. Rumput liar tumbuh di berbagai sudut karena jarang dilakukan pembersihan rutin, sehingga memberi kesan lingkungan yang kurang terawat. Sampah rumah tangga kerap dibuang secara sembarangan, dan pada saat air pasang, sebagian sampah tersebut terbawa arus dan hanyut ke perairan sekitar. Pola ini menunjukkan keterbatasan sistem pengelolaan sampah serta rendahnya ketersediaan fasilitas pendukung kebersihan lingkungan.

Aksesibilitas menuju kawasan permukiman ditunjang oleh dua jalur utama. Akses pertama adalah jalan yang melewati area bandara, berfungsi sebagai jalur utama keluar masuk kampung dan memiliki kondisi permukaan yang relatif baik.


Pengecoran Jalan Utama (dok.ippm)

Akses kedua berupa jalan alternatif (jalan potong) yang terletak di bagian belakang bandara, jalur ini sebagian merupakan jalan semen dan menjadi salah satu penghubung penting antar kampung dan kota lama. Keberadaan dua akses tersebut memberikan kemudahan mobilitas bagi warga, meskipun beberapa titik masih membutuhkan perbaikan agar lebih nyaman dilalui.

Risiko bencana di Kampung Apuri didominasi oleh banjir, terutama ketika terjadi pasang laut yang cukup besar. Air dapat naik ke kawasan permukiman dan menggenangi area rumah yang berada pada titik rendah. Selain itu, abrasi pada

bagian pemukiman yang berdekatan dengan tepi sungai menjadi ancaman lain yang dapat mengurangi luas lahan dan merusak struktur bangunan. Dalam konteks tata ruang, halaman pekarangan sangat terbatas, dan sebagian besar rumah tidak memiliki pagar maupun batas lahan yang jelas dengan rumah tetangga. Kondisi ini mencerminkan pola hunian yang tumbuh secara alami tanpa pembagian ruang yang terstruktur, sekaligus menunjukkan keterbatasan ruang di lingkungan permukiman tersebut.

7. Masalah utama dan kebutuhan perumahan

Banyak rumah di Kampung Apuri tergolong tidak layak huni (RTLH) karena kondisi bangunan yang sudah tua, material yang tidak tahan lama, serta pemeliharaan yang terbatas. Situasi ini diperburuk oleh kelebihan penghuni dalam satu rumah (*overcrowding*), di mana beberapa keluarga tinggal bersama dalam ruang yang sempit. Kepadatan tersebut memengaruhi kenyamanan dan kesehatan penghuni karena ruang gerak berkurang dan sirkulasi udara tidak optimal. Kondisi fisik bangunan yang terbatas dan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas membuat standar kelayakan tempat tinggal menjadi sulit dipenuhi.

Akses terhadap air bersih dan sanitasi juga masih sangat minim. Sebagian besar warga mengandalkan sumber air alternatif berupa air hujan, sementara fasilitas sanitasi banyak yang bersifat darurat atau tidak memenuhi syarat kesehatan. Lingkungan permukiman berada pada lokasi yang berisiko banjir dan abrasi, sehingga rumah-rumah yang sudah rapuh semakin rentan terhadap kerusakan. Ketika banjir terjadi, air dapat masuk ke area rumah dan mempercepat pelapukan struktur bangunan, sementara abrasi di tepi sungai mengancam keberlanjutan lahan permukiman.

Upaya meningkatkan kualitas hunian belum sepenuhnya terpenuhi karena bantuan perumahan dari pemerintah maupun dana desa masih terbatas. Program perbaikan rumah atau pembangunan unit baru tidak sebanding dengan jumlah keluarga yang membutuhkan, sehingga banyak rumah tangga harus bertahan dengan kondisi yang seadanya. Keterbatasan dukungan ini berpengaruh pada lambatnya penanganan terhadap masalah RTLH, sanitasi, serta mitigasi risiko lingkungan, sehingga kebutuhan peningkatan kualitas permukiman di Kampung Apuri masih menjadi prioritas mendesak.

C. Kependudukan

1. Suku-suku di Kampung

a. Suku/marga asli

Penduduk asli Kampung Apuri berasal dari marga Takati, yang menjadi kelompok kekerabatan dominan dan telah menetap secara turun-temurun di wilayah ini. Struktur sosial keluarga mengikuti sistem kekerabatan patrilineal, sehingga garis keturunan, pewarisan nama keluarga, serta pengaturan peran dalam masyarakat diturunkan melalui pihak laki-laki. Pola ini memengaruhi hubungan internal antarkeluarga, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, pembagian tugas adat, dan keterlibatan dalam dinamika sosial kampung.

Sebaran marga Takati di dalam kampung membentuk pola permukiman yang terpusat pada tiga Rukun Tetangga (RT) yang berada di kawasan inti kampung. Konsentrasi hunian ini mencerminkan kedekatan genealogis dan keterikatan sosial antarkeluarga dalam satu marga, sekaligus menunjukkan bahwa pembagian ruang permukiman berkembang mengikuti ikatan kekerabatan. Meskipun tidak dibatasi secara fisik, zona permukiman marga Takati tetap mudah dikenali melalui kedekatan rumah, pola interaksi, serta keberlanjutan tradisi keluarga yang masih dipertahankan hingga kini.

b. Suku pendatang

Masyarakat dari daerah lain yang tinggal di Kampung Apuri terdiri dari beberapa kelompok etnis seperti Kei, Toraja, dan Jawa, yang hadir bukan sebagai penduduk menetap permanen, tetapi karena pelayanan dan pengabdian. Mereka umumnya berada di Apuri dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun, sesuai masa penugasan yang diberikan oleh lembaga atau institusi tempat mereka bernaung. Kelompok ini sebagian besar adalah misionaris meliputi pastor paroki, pastor rekan, suster, maupun frater yang menjalankan pelayanan keagamaan di wilayah kampung Apuri. Selain itu, terdapat pula guru-guru yang mengajar di berbagai satuan pendidikan yang ada di Apuri, mulai dari PAUD hingga SMP.

Kehadiran mereka bersifat fungsional dan berfokus pada pelayanan pendidikan, keagamaan, serta pendampingan sosial kepada masyarakat. Meskipun hanya tinggal sementara, mereka berperan penting dalam mendukung kegiatan kampung, khususnya dalam bidang pembinaan iman, peningkatan mutu

pendidikan, dan berbagai program pemberdayaan yang dijalankan bersama masyarakat. Interaksi sosial terjalin secara baik dan penuh penghargaan, sekalipun pola menetap mereka tidak permanen dan tidak membentuk komunitas etnis tersendiri di dalam kampung.

c. Peran sosial masing-masing kelompok etnis

Masyarakat Kampung Apuri menunjukkan keterlibatan yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan kampung, adat, ekonomi, hingga kegiatan keagamaan. Dalam pemerintahan, warga aktif mengikuti musyawarah kampung, memberikan aspirasi, serta bergotong royong mendukung pelaksanaan program pembangunan. Peran adat tetap dihormati, terlihat dari kepatuhan masyarakat terhadap norma adat, partisipasi dalam upacara adat, dan penghargaan terhadap tokoh adat sebagai penjaga harmoni sosial. Pada bidang ekonomi, warga terlibat dalam aktivitas perdagangan kecil, pengelolaan hasil kebun, serta pemanfaatan fasilitas pelabuhan sebagai bagian dari rutinitas ekonomi harian. Sementara itu, pada sektor keagamaan, partisipasi terlihat sangat tinggi melalui keaktifan dalam kegiatan gereja, komunitas basis, serta berbagai agenda rohani yang memperkuat ikatan sosial antarwarga. Secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat dalam empat sektor utama ini membentuk fondasi sosial yang kokoh dan menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas serta keberlanjutan kehidupan bersama di Kampung Apuri.

d. Relasi sosial

Interaksi sosial di Kampung Apuri terjalin dalam suasana yang harmonis dan mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan masyarakat. Warga senantiasa bekerja bersama dalam berbagai kegiatan seperti pembangunan dan perbaikan jalan, pembersihan lingkungan, serta pelaksanaan acara keagamaan maupun adat. Kehadiran penduduk asli dan pendatang tidak menimbulkan sekat sosial karena seluruh warga menjaga hubungan dengan menghormati norma lokal, membangun komunikasi yang terbuka, dan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah kampung. Pola interaksi ini memperkuat solidaritas sosial dan memupuk rasa saling percaya. Kehidupan sosial yang stabil tersebut menjadikan keberagaman etnis sebagai sumber kekuatan bersama, yang secara kolektif mendorong kemajuan dan kenyamanan hidup masyarakat Kampung Apuri.

2. Nilai dan Kearifan Lokal

a. Norma adat dan sistem sosial

Norma adat di Kampung Apuri berperan sebagai landasan utama dalam mengatur hubungan sosial, menjaga ketertiban, dan memastikan kehidupan masyarakat berjalan selaras dengan nilai-nilai yang diwariskan dari leluhur. Setiap warga, terutama mereka yang berasal dari marga-marga asli, memahami bahwa adat bukan sekadar aturan, tetapi juga identitas bersama yang menjadi rujukan dalam bertindak dan berperilaku. Dalam keseharian, norma adat hadir sebagai pengingat untuk menjaga sikap, menghormati sesama, serta memelihara keseimbangan hubungan antarindividu maupun antarmarga.

Dalam penyelesaian masalah, musyawarah adat menjadi mekanisme yang selalu diutamakan. Ketika terjadi perselisihan, para pihak yang bersengketa dipertemukan dalam forum adat yang menghadirkan kepala marga, tua adat, dan anggota dewan adat kampung. Proses dialog dilakukan secara terbuka, dengan tujuan mencari kesepakatan yang dapat diterima bersama. Prinsip yang dijunjung bukan semata-mata menentukan siapa yang benar atau salah, tetapi memulihkan hubungan sosial yang terganggu agar harmoni kampung tetap terjaga. Pendekatan ini menegaskan bahwa adat Apuri lebih menekankan pada penyelesaian yang bersifat restoratif dibandingkan dengan pemberian sanksi yang menghukum.

Dalam aspek pengelolaan lahan, aturan adat mengatur dengan jelas pembagian ulayat berdasarkan garis keturunan marga. Setiap keluarga mengetahui batas-batas wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, mulai dari area perkebunan sagu, hutan rawa, hingga kawasan perairan yang menjadi sumber pangan. Pemanfaatan lahan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan, karena masyarakat menyadari bahwa tanah adalah warisan penting yang harus dijaga untuk generasi berikutnya. Hubungan masyarakat dengan lahan ulayat bukan hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki makna budaya yang dalam, menjadi simbol keterikatan dengan leluhur serta ruang hidup yang harus dipelihara.

Struktur adat yang menaungi kehidupan masyarakat terdiri dari kepala marga, tua adat, dan dewan adat kampung. Mereka menjalankan peran masing-masing dalam menjaga tatanan adat, menetapkan keputusan penting, dan mengawal keberlangsungan nilai-nilai budaya. Kepala marga menjadi penentu arah dan

penjaga kohesi internal, sementara tua adat memegang peran sebagai penyimpan pengetahuan tradisional dan penghubung antar generasi. Dewan adat hadir sebagai lembaga yang memberikan legitimasi terhadap keputusan adat serta menjadi penengah ketika terjadi masalah yang menyangkut kepentingan bersama.

Melalui kekuatan norma adat dan struktur kepemimpinan yang terorganisasi, masyarakat Kampung Apuri berhasil mempertahankan keteraturan sosial dan memelihara identitas budaya di tengah berbagai perubahan yang datang dari luar. Adat tidak hanya menjaga kampung tetap harmonis, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai leluhur terus hidup dan memberikan arah bagi kehidupan masyarakat hingga kini.

b. Ritual, tradisi dan upacara

Kampung Apuri tetap memelihara berbagai ritual dan tradisi yang menjadi bagian penting dari siklus kehidupan masyarakat serta mencerminkan hubungan yang erat dengan adat dan kepercayaan leluhur. Upacara pernikahan adat, penyambutan kelahiran, ritual duka cita, hingga tradisi syukuran atas panen sagu atau hasil tangkapan ikan yang melimpah masih dijalankan dengan penuh penghormatan. Setiap rangkaian ritual biasanya melibatkan simbol-simbol budaya yang sarat makna, seperti penggunaan pakaian adat, benda-benda pusaka, serta tatanan prosesi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Musik tifa, nyanyian tradisional, dan tarian khas pesisir menjadi bagian tak terpisahkan dalam setiap kegiatan, menghadirkan suasana kekeluargaan sekaligus menegaskan identitas budaya masyarakat Apuri.

Keberlanjutan ritual-ritual ini memiliki peran penting dalam memperkuat ikatan sosial antarwarga. Setiap upacara dilaksanakan secara gotong royong, di mana keluarga, tetangga, dan seluruh komunitas turut terlibat dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Kehadiran komunitas dalam setiap momen sakral menjadi wujud solidaritas yang mempererat hubungan sosial dan menjaga keharmonisan antarmarga. Lebih dari itu, kegiatan adat ini juga berfungsi sebagai ruang pembelajaran bagi generasi muda. Melalui partisipasi langsung, mereka mempelajari nilai-nilai budaya, sejarah kampung, serta tata cara adat yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Apuri. Dengan demikian, ritual dan tradisi yang

terus dijalankan tidak hanya melestarikan warisan leluhur, tetapi juga memastikan keberlanjutannya sebagai bagian integral dari jati diri kampung.

c. Pengetahuan lokal

Masyarakat Kampung Apuri memiliki pengetahuan lokal yang sangat kaya dan teruji dalam mengelola lingkungan pesisir dan sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan mereka. Kemampuan memahami pola musiman, pasang surut air, arah angin, serta dinamika sungai membuat mereka mampu menentukan waktu yang tepat untuk melaut, mencari ikan, mengolah sagu, dan memanfaatkan hasil kebun secara berkelanjutan. Warga mengetahui dengan baik lokasi-lokasi yang aman untuk beraktivitas maupun area yang harus dihindari pada kondisi tertentu, terutama saat debit sungai meningkat atau ketika gelombang laut mulai tinggi. Pengetahuan ekologis ini terbentuk melalui pengalaman panjang, observasi alam yang terus-menerus, dan keterlibatan langsung dalam aktivitas subsisten sejak usia dini.

Selain itu, masyarakat Apuri memiliki kearifan dalam menghadapi risiko bencana lokal, terutama banjir pasang besar yang sering mengancam permukiman pesisir. Mereka mengatur waktu melaut dengan menyesuaikan kalender pasang, memilih lokasi rumah pada area yang relatif lebih aman, serta menerapkan cara-cara tradisional untuk mengurangi dampak luapan air. Pengetahuan tentang obat-obatan alami dari hutan, navigasi sungai, membaca kedangkalan alur, hingga kemampuan membuat kerajinan tangan juga diwariskan turun-temurun dan tetap dipraktikkan hingga kini. Keterampilan ini tidak hanya menjadi modal penting bagi keberlangsungan hidup komunitas, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat Apuri sebagai kelompok yang hidup selaras dengan alam dan mampu beradaptasi dengan tantangan lingkungan pesisir.

d. Nilai-nilai dasar masyarakat

Nilai solidaritas dan gotong royong menjadi salah satu ciri paling menonjol dalam kehidupan masyarakat Kampung Apuri. Warga terbiasa saling membantu dalam berbagai kegiatan, mulai dari pekerjaan berat seperti perbaikan rumah dan pembangunan fasilitas kampung hingga pelaksanaan upacara adat dan kegiatan keagamaan. Kepedulian antarwarga tumbuh kuat karena adanya kesadaran kolektif bahwa kemajuan kampung hanya dapat dicapai melalui kebersamaan. Praktik

gotong royong ini juga menjadi media yang mempererat hubungan sosial sekaligus memperkuat rasa saling percaya di antara seluruh anggota komunitas.

Hubungan antarmarga di Kampung Apuri dibangun atas dasar kerja sama dan penghargaan terhadap fungsi serta kedudukan masing-masing dalam struktur sosial. Setiap marga memahami peran tradisional yang melekat pada mereka, sehingga koordinasi dalam kegiatan adat maupun kemasyarakatan dapat berlangsung lancar dan harmonis. Nilai kekeluargaan dijunjung tinggi dan tercermin dari penghormatan kepada tokoh adat serta tokoh agama yang memiliki posisi penting dalam proses musyawarah, penyelesaian masalah, dan pembinaan moral masyarakat. Keberadaan mereka memastikan bahwa keputusan-keputusan penting tetap berpijak pada nilai budaya dan etika lokal, sehingga kehidupan sosial kampung tetap stabil, teratur dan saling mendukung.

d. **Bahasa lokal**

Bahasa lokal masih memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Apuri, terutama di kalangan penduduk asli dan para tetua kampung yang menggunakannya dalam percakapan, musyawarah kecil, maupun aktivitas adat. Namun, penggunaannya menunjukkan kecenderungan menurun pada generasi muda yang lebih sering berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia, baik di sekolah, ruang publik, maupun dalam komunikasi antarteman. Pergeseran ini tidak terlepas dari pengaruh pendidikan formal dan meningkatnya akses terhadap media modern yang mendorong penggunaan bahasa nasional dalam berbagai situasi.

Meskipun demikian, upaya pelestarian bahasa lokal tetap berlangsung melalui berbagai cara yang diwariskan secara turun-temurun. Cerita rakyat, sejarah marga, serta kisah perjalanan leluhur masih disampaikan dalam bahasa asli sebagai bentuk pendidikan budaya informal bagi anak-anak. Bahasa lokal juga digunakan dalam upacara adat dan kegiatan keagamaan tertentu sebagai simbol kesakralan dan penghormatan terhadap tradisi lama. Di lingkungan keluarga, orang tua dan tetua berperan aktif mengajarkan kosakata dasar dan makna-makna budaya yang terkandung di dalamnya. Walau tantangan modernisasi cukup besar, bahasa lokal tetap menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Apuri, memperkukuh rasa

kebersamaan, serta menghubungkan warga dengan akar sejarah dan warisan leluhur mereka.

3. Keadaan Penduduk

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kampung Apuri menunjukkan komposisi demografis yang relatif kecil namun berkembang secara dinamis. Berdasarkan data agregat semester-1 Dukcapil tahun 2025, jumlah penduduk Kampung Apuri sebanyak 260 orang berasal dari 61 Kepala Keluarga. Struktur kependudukan ini mencerminkan karakter permukiman pesisir yang tumbuh secara bertahap seiring mobilitas internal masyarakat Kamoro serta kedatangan penduduk dari wilayah terdekat. Dinamika tersebut terbentuk melalui hubungan kekerabatan, perpindahan keluarga muda, serta ikatan sosial yang terbangun sejak lama antara kampung Apuri dan kampung-kampung sekitar.

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin memperlihatkan bahwa jumlah laki-laki mencapai 141 jiwa (54,23%), sedangkan perempuan berjumlah 119 jiwa (45,77%). Ketimpangan proporsi ini menunjukkan dominasi laki-laki yang cukup mencolok dan berkaitan erat dengan karakter masyarakat pesisir, di mana laki-laki memegang peran penting dalam aktivitas ekonomi seperti penangkapan ikan, pengelolaan sumber daya sungai, serta pekerjaan lain yang menuntut mobilitas dan tenaga fisik. Sementara itu, perempuan berperan besar dalam pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan kebun, dan aktivitas sosial yang mendukung keberlangsungan kehidupan komunitas.

Secara etnis, Kampung Apuri didominasi oleh Suku Kamoro sebagai penduduk asli yang menghuni wilayah ini secara turun-temurun. Identitas Kamoro tercermin dalam pola permukiman, praktik adat, penggunaan bahasa lokal, serta orientasi mata pencaharian yang berakar kuat pada sumber daya pesisir dan sungai. Keberadaan mereka menjadi fondasi utama dalam struktur sosial dan budaya kampung. Di samping itu, terdapat juga kelompok pendatang dalam jumlah kecil yang telah menetap sejak sebelum tahun 1960-an, ketika misionaris Belanda hadir untuk memperkenalkan ajaran Katolik. Selain itu, pendatang dari suku Kei dan Jawa yang umumnya bekerja sebagai tenaga pengajar dan tenaga kesehatan turut memperkaya interaksi sosial serta mendukung penyediaan layanan dasar di

kampung. Kehadiran mereka menambah keberagaman sekaligus menguatkan jejaring sosial dan struktur kehidupan masyarakat Apuri secara menyeluruh.

b. Struktur umur penduduk

Struktur umur penduduk memberikan gambaran tentang potensi demografi yang dapat dimaksimalkan melalui perencanaan pembangunan yang responsif usia, terutama dalam penyediaan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kapasitas ekonomi. Distribusi penduduk Kampung Apuri menurut umur pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Distribusi Penduduk Kampung Apuri menurut Umur Tahun 2025

No.	Interval Umur (Tahun)	Jumlah	Presentase
1.	0 - 4	19	7,31
2.	5 - 9	24	9,23
3.	10 - 14	25	9,62
4.	15 - 19	26	10,00
5.	20 - 24	30	11,54
6.	25 - 29	24	9,23
7.	30 - 34	24	9,23
8.	35 - 39	21	8,08
9.	40 - 44	16	6,15
10.	45 - 49	13	5,00
11.	40 - 54	5	1,92
12.	55 - 59	6	2,31
13.	60 - 64	5	1,92
14.	65 - 69	10	3,58
15.	70 - 74	5	1,92
16	75+	7	2,69
	Total	260	100

Sumber: DKB Dinas Dukcapil Semester I, Tahun 2025

Distribusi penduduk kampung Apuri berdasarkan Rasio beban tanggungan *(Dependency Ratio)* yaitu sebesar:

$$\frac{68 + 22}{165} \times 100 = 52{,}94 \text{ dibulatkan menjadi } 52$$

Sesuai dengan angka tersebut di atas, berarti DR di kampung Apuri sebesar 52, dimana setiap 100 orang produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung 52 orang yang tidak produktif (usia 0-14 tahun dan ≥ 65+ tahun). Tingginya angka

rasio beban tanggungan ini merupakan faktor penghambat pembangunan ekonomi di kampung Apuri, karena sebagian pendapatan yang diperoleh kelompok yang produktif terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum atau tidak produktif.

Namun fakta menarik lain bahwa berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) Dinas Dukcapil Mimika Semester-1 Tahun 2025, jumlah penduduk kampung Apuri yang telah terekam administrasi kependudukan berupa dokumen e-KTP (88,44%), Akte Kelahiran (98,80%), Kartu Keluarga (98,35%) dan Kartu Identitas Anak (74,68%). Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk kampung Apuri telah tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan, sehingga berpotensi memberikan peluang akses mereka terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta berbagai program perlindungan pemerintah.

c. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk merupakan indikator penting untuk menggambarkan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan jenjang pendidikan formal tertinggi yang berhasil diselesaikan oleh seseorang, serta mencerminkan kemampuan literasi, kapasitas kerja dan potensi partisipasi dalam pembangunan sosial maupun ekonomi.

Akses pendidikan di Kampung Apuri masih sangat terbatas, hanya tersedia SD Negeri sebagai satu-satunya lembaga pendidikan formal yang dapat dijangkau langsung oleh anak-anak. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, peserta didik harus melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA yang berada di ibu kota distrik atau bahkan harus pergi ke Kota Timika. Kondisi tersebut membuat proses melanjutkan sekolah menjadi tantangan tersendiri bagi banyak keluarga karena keterbatasan akses, biaya dan dukungan logistik bagi anak-anak yang harus tinggal jauh dari rumah. Situasi ini berkontribusi pada rendahnya keberlanjutan pendidikan dan tingginya angka putus sekolah, terutama pada transisi dari SD ke SMP.

Distribusi penduduk Kampung Apuri menurut tingkat pendidikan pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Distribusi Penduduk Kampung Apuri menurut
Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		L	P		
1.	Tidak/belum sekolah	50	33	83	31,92
2.	Belum Tamat SD	17	12	29	11,15
3.	Tamat SD	5	4	9	3,46
4.	SLTP	32	39	71	27,31
5.	SLTA	34	25	59	22,69
6.	Diploma I/II	0	1	1	0,38
7.	Akademi/D-III	1	0	1	0,38
8.	D-IV/S-1	2	5	7	2,69
	Jumlah	141	119	260	100

Sumber: DKB Dukcapil Semester-1, 2025

Data tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk kampung Apuri belum menikmati akses pendidikan yang memadai. Data mencatat 31,92% penduduk tidak pernah bersekolah, sementara belum tamat SD 11,15%, lulusan SD 3,46%, SMP 27,31% dan SMA 22,69%, sedangkan penduduk yang tercatat menamatkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi sebanyak 3,45%. Komposisi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk masih berada pada tingkat pendidikan dasar atau bahkan tidak berpendidikan formal sama sekali (73,84%), sehingga kapasitas literasi dan keterampilan dasar masyarakat masih sangat terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat jelas bahwa Kampung Apuri belum memenuhi target Wajib Belajar 9 Tahun, yang minimal mensyaratkan penyelesaian pendidikan hingga jenjang SMP. Rendahnya persentase lulusan SMP dan tingginya jumlah penduduk yang tidak sekolah menunjukkan adanya hambatan serius dalam akses dan keberlanjutan pendidikan, baik dari sisi sarana, dukungan keluarga, maupun kondisi sosial ekonomi. Situasi ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan memerlukan intervensi pendidikan yang lebih terarah untuk memutus rantai ketertinggalan.

Akses pendidikan nonformal seperti kursus keterampilan, pendidikan keaksaraan, pelatihan vokasional, atau kegiatan pemberdayaan masyarakat, hanya tersedia di Kota Timika dan hampir tidak pernah diikuti oleh warga Kampung Apuri. Tidak adanya program pendidikan nonformal yang diselenggarakan di

kampung menyebabkan masyarakat kehilangan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dasar, memperluas wawasan, atau mengembangkan kemampuan kerja yang relevan dengan kebutuhan lokal. Akibatnya peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi terbatas, dan sebagian besar penduduk tetap bergantung pada pengetahuan tradisional serta kemampuan lokal.

d. Matapencaharian/pekerjaan

Mata pencaharian merupakan kegiatan utama yang dilakukan untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Konsep ini juga menggambarkan struktur ekonomi masyarakat, tingkat kemandirian, kemampuan memanfaatkan sumber daya lokal, serta sejauh mana suatu komunitas memiliki akses terhadap kesempatan kerja formal maupun informal.

Distribusi penduduk Kampung Apuri menurut matapencaharian pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Distribusi Penduduk Kampung Apuri menurut Matapencaharian Tahun 2025

No.	Matapencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Belum Bekerja	210	80,77
2.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	10	3,85
3.	Tenaga Pengajar	2	0,77
4.	Wiraswasta	21	8,08
5.	Petani/Pekebun	11	4,23
6.	Nelayan	6	2,31
	Jumlah	260	100

Sumber: DKB Dukcapil Semester-1, 2025

Data tabel di atas menunjukkan bahwa struktur ekonomi kampung Apuri yang masih didominasi aktivitas subsisten dan keterbatasan kesempatan kerja formal sehingga sebagian besar (80,77%) penduduk tidak bekerja. Matapencaharian utama yang terkait langsung dengan sumber daya alam terdiri dari petani (4,23%) dan nelayan (2,31%), selain wiraswasta yang mencapai 8,08%. Pekerjaan formal masih sangat terbatas, dengan ASN (3,85%), dan tenaga pengajar (0,77%)

Secara keseluruhan, pola ini menegaskan bahwa mata pencaharian penduduk Kampung Apuri masih berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam dan aktivitas ekonomi tradisional. Dominasi nelayan serta rendahnya proporsi pekerjaan formal menunjukkan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja yang

lebih mapan. Struktur matapencaharian tersebut menggambarkan tingginya ketergantungan masyarakat kampung Apuri pada sektor informal serta perlunya pengembangan keterampilan dan diversifikasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk kampung.

e. Status sosial ekonomi

Sebagian besar penduduk Kampung Apuri masih berada dalam kategori miskin, yang tercermin dari rendahnya tingkat pendapatan, terbatasnya aset produktif, serta ketergantungan pada mata pencaharian subsisten seperti menangkap ikan, mengumpulkan hasil hutan, dan berkebun dalam skala kecil. Pola ekonomi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari membuat masyarakat sulit mencapai stabilitas finansial, terutama ketika kondisi cuaca ekstrem menghambat aktivitas melaut atau mencari hasil alam. Situasi ini diperburuk oleh minimnya peluang kerja formal serta keterbatasan sarana pendukung ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.

Akses terhadap layanan dasar di Kampung Apuri juga masih belum optimal. Meski terdapat sumur gali, kualitas airnya hanya layak digunakan untuk mencuci sehingga kebutuhan air bersih bergantung pada penampungan air hujan dan sumber alami yang tidak selalu tersedia sepanjang waktu. Listrik dari PLN telah menjangkau kampung, namun pemanfaatannya terbatas oleh besaran daya serta kemampuan rumah tangga untuk membeli token secara rutin. Dalam bidang kesehatan, masyarakat hanya dapat memperoleh layanan melalui Puskesmas di tingkat distrik atau fasilitas kesehatan di Kota Timika. Jarak yang jauh dan keterbatasan transportasi menjadi kendala signifikan, terutama saat menghadapi kondisi darurat yang memerlukan penanganan cepat. Kombinasi tantangan ekonomi dan akses layanan dasar ini menggambarkan kondisi kerentanan yang masih dialami sebagian besar penduduk Kampung Apuri.

f. Agama dan lembaga keagamaan

Keberagaman agama di Kampung Apuri menggambarkan dinamika sosial yang tumbuh seiring perjalanan panjang sejarah penyebaran iman di wilayah Mimika. Sejak kedatangan para misionaris Belanda pada tahun 1920-an, yang memulai karya pewartaan Katolik di Kokonao, ajaran-ajaran iman mulai diperkenalkan kepada masyarakat setempat. Nilai-nilai keagamaan tersebut

kemudian diwariskan secara turun-temurun hingga membentuk fondasi moral, etika sosial, serta identitas kolektif warga Kampung Apuri.

Hingga tahun 2025, sebagian besar masyarakat Kampung Apuri memeluk agama Katolik dengan persentase mencapai 86,15%. Dominasi ini tidak hanya tercermin pada jumlah penganutnya, tetapi juga pada peran Gereja sebagai pusat kehidupan rohani dan sosial. Paroki Maria Bintang Laut Kokonao menjadi ruang perjumpaan bagi warga untuk berdoa, bertukar pikiran, dan memperkuat rasa kebersamaan. Tradisi keagamaan yang hidup dalam komunitas ini turut membentuk pola perilaku, cara masyarakat menjalin relasi, serta sikap mereka dalam menghadapi beragam tantangan hidup.

Sementara itu, sebagian kecil penduduk menganut agama lain, yang keberadaannya tetap dihargai dalam semangat toleransi dan hidup berdampingan. Komposisi penduduk berdasarkan agama pada tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3.4 menunjukkan bahwa pluralitas tetap ada meskipun dalam proporsi kecil. Hal ini mencerminkan keterbukaan masyarakat dalam menerima perbedaan, sekaligus memperkuat identitas Kampung Apuri sebagai komunitas yang memiliki fondasi keagamaan kuat namun tetap inklusif.

Tabel 3.4 Distribusi Penduduk Kampung Apuri menurut Agama Tahun 2025

No.	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Katolik	224	86,15
2.	Protestan	36	13,08
3.	Islam	2	0,77
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
	Jumlah	260	100

Sumber: DKB Dukcapil Semester I, Tahun 2025

Selain dominannya umat Katolik, kehidupan beragama di Kampung Apuri juga diwarnai oleh kehadiran sejumlah penduduk dari kalangan pendatang yang memeluk agama Protestan. Mereka umumnya datang dari berbagai daerah di Papua maupun luar Papua untuk bekerja sebagai pedagang, guru, atau tenaga kesehatan. Sebagian tinggal untuk waktu tertentu, sementara sebagian lainnya menetap lebih lama dan menjadi bagian dari dinamika sosial masyarakat setempat.

Kehadiran kelompok pendatang ini menambah corak keberagaman religius di Kampung Apuri tanpa menimbulkan ketegangan sosial. Masyarakat setempat telah

terbiasa hidup dalam semangat saling menghormati, sehingga setiap pemeluk agama dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya dengan aman dan leluasa. Interaksi sehari-hari antara umat Katolik dan umat Protestan berjalan dalam suasana harmonis, baik dalam kegiatan sosial, pendidikan, maupun kerja sama antar warga sebagai warga kampung.

Relasi yang inklusif ini memperlihatkan bahwa keberagaman agama tidak menjadi penghalang bagi terwujudnya kohesi sosial. Sebaliknya keberadaan pemeluk Protestan turut memperkaya kehidupan komunitas, menciptakan ruang perjumpaan lintas keyakinan yang semakin memperkuat toleransi serta solidaritas warga Kampung Apuri.

4. Migrasi dan Mobilitas Penduduk

a. Migrasi masuk (*in-migration*)

Pergerakan penduduk dari berbagai kampung menuju Kampung Apuri berlangsung dengan relatif lancar berkat keberadaan dermaga umum yang berfungsi sebagai titik akses utama transportasi air. Dermaga ini menjadi jalur mobilitas yang penting, memungkinkan penduduk dari kampung-kampung sekitar untuk datang dan pergi dengan mudah, baik menggunakan perahu motor maupun transportasi air tradisional. Keberadaan fasilitas ini tidak hanya memperlancar arus kunjungan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antarwilayah di pesisir Teluk Etna.

Mayoritas pendatang yang masuk ke Kampung Apuri berasal dari Distrik Amar, Mimika Barat Tengah, dan Mimika Barat Jauh. Kunjungan tersebut umumnya bersifat kekeluargaan, terutama untuk menghadiri acara keagamaan, mengikuti misa atau kegiatan paroki, serta turut serta dalam upacara adat yang melibatkan beberapa marga atau komunitas lintas kampung. Mobilitas sosial ini mencerminkan kuatnya ikatan genealogis dan jaringan sosial yang terpelihara antarwilayah hingga kini.

Di samping itu, kehadiran penduduk non-OAP dalam jumlah terbatas biasanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas tertentu, seperti pelayanan pemerintahan, kegiatan teknis terkait pembangunan, atau penugasan dari lembaga keagamaan dan pelayanan publik. Mereka hadir dalam rentang waktu tertentu sesuai tugas yang diemban dan jarang menetap secara permanen.

Meskipun arus mobilitas masuk berlangsung secara rutin, kedatangannya tidak menimbulkan perubahan berarti terhadap struktur sosial maupun pola kehidupan komunitas Kampung Apuri. Tatanan adat tetap dijalankan sebagaimana mestinya, solidaritas antar marga terpelihara dengan kuat, dan aktivitas ekonomi lokal yang umumnya bersifat subsisten tetap berlangsung stabil tanpa adanya tekanan dari luar. Dengan demikian, mobilitas penduduk justru memperkaya interaksi sosial tanpa mengganggu keseimbangan sosial-budaya yang telah lama menjadi ciri kehidupan masyarakat Apuri.

b. Migrasi keluar (*out-migration*)

Mobilitas penduduk Kampung Apuri tidak hanya berlangsung dari luar ke dalam, tetapi juga terjadi melalui pergerakan keluar menuju wilayah perkotaan, terutama Kota Timika. Migrasi keluar ini dilakukan berbagai kelompok usia dengan tujuan yang beragam, mencerminkan dinamika sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang mulai terhubung lebih intens dengan pusat pelayanan dan aktivitas kota.

Sebagian penduduk memilih tinggal lebih lama di Timika karena alasan pekerjaan, baik dalam sektor informal maupun formal, yang menawarkan peluang pendapatan lebih stabil dibandingkan kegiatan ekonomi subsisten di kampung. Selain itu, sejumlah pemuda dan anak-anak usia sekolah menetap sementara di kota untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang tidak tersedia di Kampung Apuri. Mobilitas ini menjadi salah satu strategi keluarga dalam memperluas peluang masa depan generasi muda.

Di sisi lain, terdapat pula mobilitas jangka pendek di mana penduduk bepergian ke Timika untuk keperluan tertentu dan kembali ke kampung setelah urusan selesai. Perjalanan ini umumnya terkait kunjungan keluarga, menghadiri kegiatan pemerintahan, atau mengikuti ibadat dan pelayanan gerejawi pada tingkat paroki maupun dekanat. Pola mobilitas semacam ini memperlihatkan keterhubungan masyarakat kampung Apuri dengan jaringan sosial dan kelembagaan di tingkat kabupaten.

Pergerakan keluar kampung memberikan sejumlah dampak positif bagi rumah tangga di kampung Apuri. Salah satu kontribusi yang paling nyata adalah pengiriman uang atau remitan dari anggota keluarga yang bekerja atau tinggal di kota. Remitan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,

mendukung pendidikan anak, serta membantu pembiayaan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di kampung. Kontribusi ekonomi ini turut memperkuat ketahanan keluarga dan kehidupan komunitas.

Selain manfaat material, interaksi penduduk Apuri dengan lingkungan perkotaan membawa pengaruh pada cara pandang, gaya hidup, dan pola komunikasi. Keterpaparan terhadap tata kehidupan kota mendorong sebagian warga untuk mengadopsi pola pikir yang lebih terbuka dan adaptif, terutama terkait pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan rumah tangga. Namun perubahan ini tidak sampai menggeser nilai-nilai adat dan budaya lokal yang tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan masyarakat. Identitas Kamoro yang kuat, norma adat, dan ikatan kekerabatan tetap terpelihara sebagai pedoman perilaku komunitas.

Dengan demikian, mobilitas keluar Kampung Apuri tidak hanya menjadi bagian dari kebutuhan ekonomi dan pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan yang memperkaya pengalaman warga tanpa mengurangi kekokohan nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun.

c. Mobilitas harian/berkala

Aktivitas keluar-masuk penduduk Kampung Apuri berlangsung secara rutin, baik dalam pola harian maupun musiman, dan merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada ritme alam serta kebutuhan ekonomi keluarga. Mobilitas harian umumnya terjadi untuk memenuhi keperluan ekonomi subsisten, seperti mengambil hasil kebun, pergi ke dusun sagu, atau menebar jaring di laut. Kegiatan ini dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan sesuai pembagian peran tradisional dalam rumah tangga. Sebagian warga juga melakukan perjalanan singkat ke Timika untuk menjual hasil tangkapan, membeli kebutuhan pokok, atau mengurus kepentingan administratif.

Selain pergerakan harian, masyarakat Kampung Apuri mengenal mobilitas musiman yang bergantung pada pola produksi sumber daya alam dan jadwal kegiatan adat. Pada musim udang, misalnya, penduduk lebih sering melakukan perjalanan ke lokasi-lokasi penangkapan yang dianggap produktif. Aktivitas pengolahan sagu juga memicu peningkatan mobilitas ke dusun yang menjadi sumber bahan pangan utama. Pada saat-saat tertentu, warga turut melakukan perjalanan ke kampung tetangga yang berdekatan untuk menghadiri upacara adat,

mengikuti kegiatan keagamaan, atau memenuhi undangan kekerabatan yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Kamoro.

Pola mobilitas ini bersifat sementara dan tidak menimbulkan perubahan permanen dalam komposisi penduduk Kampung Apuri. Meskipun pergerakan keluar-masuk cukup intens, masyarakat selalu kembali ke kampung setelah kegiatan selesai karena ikatan kekerabatan, tanah ulayat, dan struktur sosial adat yang kuat tetap menjadi pusat orientasi kehidupan mereka. Dengan demikian, mobilitas harian dan musiman di Kampung Apuri lebih mencerminkan dinamika ekonomi dan budaya daripada perpindahan penduduk dalam arti demografis.

d. Dinamika perubahan komposisi penduduk

Meskipun Kampung Apuri mengalami mobilitas penduduk berupa kedatangan warga dari kampung sekitar, migrasi sementara ke kota, maupun pergerakan harian untuk aktivitas ekonomi, komposisi penduduk secara umum tetap stabil. Arus masuk dan keluar yang terjadi berlangsung dalam skala kecil serta bersifat sementara, sehingga tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap struktur demografi kampung. Jumlah penduduk dari tahun ke tahun relatif konstan karena masyarakat masih berpegang kuat pada tanah ulayat, ikatan kekerabatan, dan peran adat yang menjadi dasar kehidupan bersama.

Kestabilan ini berpengaruh positif terhadap perencanaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan perumahan. Kebutuhan masyarakat masih dapat dipenuhi oleh kapasitas yang tersedia karena tidak terjadi lonjakan atau penurunan populasi secara drastis. Fasilitas pendidikan tetap mampu menampung anak usia sekolah, sementara akses layanan kesehatan di tingkat distrik tetap memadai untuk melayani warga. Berbagai bentuk mobilitas yang terjadi dapat dipahami sebagai dinamika sosial yang normal, tanpa membawa dampak besar terhadap pola pembangunan maupun tatanan kehidupan di Kampung Apuri.

D. Pendidikan

1. Konsep Masyarakat tentang Pendidikan

a. Pandangan umum masyarakat

Dalam pandangan masyarakat Kampung Apuri, pendidikan menempati posisi yang sangat penting sebagai fondasi bagi masa depan generasi penerus. Kesadaran

kolektif mengenai nilai strategis pendidikan terbentuk melalui pengalaman hidup dan harapan akan perubahan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Para orang tua memandang sekolah sebagai ruang yang membuka peluang baru, tidak hanya untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga untuk memperluas wawasan serta membentuk kemampuan anak dalam menata masa depan. Komitmen ini terlihat dari kesungguhan mereka dalam mendukung kehadiran anak di sekolah, termasuk kebiasaan mengantar anak hingga ke depan sekolah sebagai wujud perhatian dan dorongan agar anak benar-benar mengikuti pembelajaran dengan disiplin.

Pemahaman masyarakat tentang fungsi pendidikan juga berkembang ke arah yang lebih progresif. Pendidikan tidak lagi dipandang sekadar memenuhi kewajiban formal, tetapi telah dipahami sebagai sarana utama untuk meraih pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta memperkuat posisi sosial di masyarakat. Pandangan ini semakin menguat berkat contoh nyata dari putra-putri Kampung Apuri yang berhasil menempuh pendidikan tinggi dan mengabdi sebagai pastor serta dokter. Kehadiran mereka menjadi inspirasi bagi seluruh warga, sekaligus bukti bahwa pendidikan mampu membuka jalan bagi perubahan positif. Dengan demikian, pendidikan telah menjadi bagian penting dari aspirasi kolektif masyarakat Apuri dalam membangun masa depan kampung yang lebih maju dan bermartabat.

b. Peran keluarga dalam pendidikan anak

Keterlibatan orang tua di Kampung Apuri dalam memastikan kehadiran anak di sekolah tergolong sangat tinggi. Para orang tua menunjukkan perhatian yang konsisten terhadap pendidikan anak, mulai dari membangun kebiasaan disiplin hingga memastikan anak benar-benar mengikuti proses pembelajaran setiap hari. Sikap ini tampak jelas dari kebiasaan mereka mengantar anak hingga ke depan sekolah, sebuah tindakan yang mencerminkan kesungguhan dalam mendukung pendidikan formal. Langkah tersebut juga menjadi bentuk pengawasan langsung agar anak tidak bolos atau teralihkan oleh aktivitas lain, sekaligus memberikan keyakinan kepada pihak sekolah bahwa keluarga berperan aktif dalam keberhasilan pendidikan anak.

Selain dukungan terhadap pendidikan formal, orang tua di Apuri juga memberikan pendampingan melalui pendidikan informal yang berlangsung dalam

kehidupan sehari-hari. Anak-anak diajak terlibat dalam berbagai aktivitas tradisional, seperti menjaring ikan, mencari karaka dan udang, atau pergi ke dusun sagu untuk belajar cara menotok sagu. Melalui kegiatan ini, mereka memperoleh keterampilan dasar yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat, memahami ritme alam, serta mengenal nilai kerja keras dan kebersamaan. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara pendidikan modern dan pengetahuan lokal, sehingga anak-anak tumbuh dengan kemampuan akademik sekaligus keterampilan hidup yang relevan dengan lingkungan sosial-budaya Kampung Apuri.

c. Nilai-nilai lokal tentang pendidikan

Kearifan adat di Kampung Apuri memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perkembangan pendidikan anak. Salah satu wujud nyata dari nilai budaya tersebut adalah keberadaan karapu, yakni rumah adat yang menjadi ruang awal bagi penanaman nilai-nilai tradisional dalam kehidupan masyarakat Mimika. Karapu berfungsi sebagai pusat pembelajaran budaya yang diperuntukkan bagi anak-anak sejak usia sekitar lima tahun. Di tempat inilah mereka diperkenalkan pada norma sosial, etika pergaulan, serta pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab sebagai bagian dari komunitas.

Penanaman nilai melalui karapu tidak hanya berfokus pada aspek adat, tetapi juga mengandung harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan berhati bersih. Proses belajar berlangsung melalui bimbingan para tetua adat yang dihormati karena kebijaksanaan serta pengalaman hidupnya. Dengan demikian, karapu menjadi jembatan antara pendidikan formal yang dikembangkan sekolah dan pendidikan karakter berbasis tradisi. Kehadiran lembaga adat ini memperkuat fondasi moral generasi muda dan sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai luhur masyarakat Apuri tetap diwariskan secara berkelanjutan di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

d. Isu dan tantangan sosial

Meskipun pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan terus meningkat, fenomena kawin muda masih dijumpai pada sebagian remaja di Kampung Apuri. Perkawinan pada usia relatif dini ini umumnya terjadi karena faktor kedekatan sosial, ikatan kekeluargaan, serta dorongan budaya yang masih

hidup dalam sebagian kecil kelompok masyarakat. Meski tidak dominan, keberadaan praktik kawin muda tetap menjadi perhatian karena berpotensi membatasi akses dan kesempatan remaja untuk melanjutkan pendidikan maupun mengembangkan potensi diri secara optimal.

Di sisi lain, beban kerja anak dalam kegiatan domestik maupun aktivitas ekonomi seperti membantu di kebun, mencari hasil laut, atau ikut ke sungai tidak lagi tampak menonjol. Hal ini mencerminkan perubahan pola asuh orang tua yang semakin menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama bagi masa depan anak. Sebagian besar keluarga berupaya memberikan ruang belajar yang memadai dan meminimalkan tuntutan pekerjaan fisik agar anak-anak dapat fokus bersekolah dan mencapai cita-cita mereka. Pergeseran nilai ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa keberhasilan generasi muda sangat bergantung pada kesempatan memperoleh pendidikan yang baik dan berkelanjutan.

2. Kelembagaan Pendidikan

a. Jenis Lembaga dan status sekolah

Lembaga pendidikan di Kampung Apuri dan wilayah Kokonao menunjukkan struktur yang cukup lengkap pada jenjang dasar, meskipun masih terdapat keterbatasan pada jenjang menengah atas. Di tingkat pra-sekolah, anak-anak mengikuti pendidikan di TK Bintang Laut sebagai tahap awal pembentukan karakter dan kemampuan dasar. Jenjang berikutnya dilanjutkan di SD YPPK St. Fransiskus Xaverius Kokonao dan SMP YPPK Lecocq D'Armandville Kokonao. Ketiga lembaga pendidikan tersebut berada di bawah Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), sehingga proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mengintegrasikan nilai moral, kedisiplinan, dan pembinaan rohani sesuai tradisi pendidikan Katolik. Keberadaan ketiga sekolah ini menjadi pilar penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar masyarakat kampung Apuri.

Pada jenjang yang lebih tinggi, Kampung Apuri belum memiliki fasilitas setingkat SMA. Untuk melanjutkan pendidikan menengah atas, para siswa dari Apuri umumnya bersekolah di SMAN 3 yang berada di kampung tetangga, yakni Kampung Kokonao. Mobilitas pelajar ke Kokonao difasilitasi oleh keberadaan Asrama Putri Bintang Kejora dan Asrama Putra yang menampung para siswa

selama masa studi mereka. Asrama ini berfungsi sebagai tempat tinggal aman dan teratur bagi anak-anak yang berasal dari Apuri, mengingat jarak serta kondisi geografis yang dapat menyulitkan perjalanan harian terutama bagi siswa yang berasal dari distrik Amar. Dengan demikian, sistem pendidikan di Apuri berjalan melalui kombinasi sekolah yayasan pada jenjang TK sampai SMP dan dukungan asrama bagi pelajar SMA, yang secara keseluruhan menjadi fondasi penting bagi peningkatan kapasitas generasi muda di wilayah pesisir tersebut.

b. Fasilitas sekolah

Sarana pendidikan di Kampung Apuri ditandai dengan keberadaan satu unit bangunan Sekolah Dasar YPPK St. Fransiskus Xaverius yang cukup representatif, terdiri atas sembilan ruang kelas, ruang guru yang digabung bersama ruang kepala sekolah, serta rumah guru yang berada tepat di lingkungan kompleks sekolah. Namun demikian, sekolah masih menghadapi keterbatasan fasilitas penunjang pembelajaran, khususnya perpustakaan, laboratorium, toilet, dan akses air bersih. Berikut keadaan jumlah siswa dan guru SD YPPK St. Fransiskus Xaverius di Kampung Apuri.


Ruang kelas yang baru direnovasi (dok.ippm)

Tabel 3.5 Keadaan Siswa dan Guru SD YPPK St. Fransiskus Xaverius Tahun 2025

No.	Tingkat Kelas	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1.	Kelas 1	34	1
2.	Kelas 2	59	2
3.	Kelas 3	44	1
4.	Kelas 4	49	2
5.	Kelas 5	61	2
6.	Kelas 6	26	1
	Jumlah	273	9

Sumber: Monografi Sekolah, 2025

Terdapat juga satu unit bangunan Sekolah Menengah Petama YPPK Lecocq D'Armandville yang terdiri atas delapan ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, serta rumah guru yang berada tepat di lingkungan kompleks sekolah. Sekitar 80% ruang kelas di Kampung Apuri sebenarnya sudah tidak layak

Ruang kelas yang baru direnovasi (dok.ippm)

digunakan karena tiang penyangga yang mulai rapuh dan tidak lagi mampu menopang bangunan dengan aman. Kondisi ini menimbulkan risiko serius, termasuk kemungkinan robohnya ruang kelas saat proses belajar berlangsung akibat melemahnya struktur pondasi. Keadaan jumlah siswa dan guru SMP YPPK Lecocq D'Armandville sebagai berikut:

Tabel 3.6 Siswa dan Guru SMP YPPK Lecocq D'Armandville Tahun 2025

No.	Tingkat Kelas	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1.	Kelas VII/A	35	1
2.	Kelas VII/B	37	1
3.	Kelas VII/C	30	1
4.	Kelas VIII/A	41	1
5.	Kelas VIII/B	41	1
6.	Kelas VIII/C	41	1
7.	Kelas IX/A	44	1
8.	Kelas IX/B	33	1
	Jumlah	302	8

Sumber: Monografi Sekolah, 2025

Secara keseluruhan sektor pendidikan di Kampung Apuri telah memiliki fondasi dasar yang memadai, namun tetap memerlukan peningkatan sarana, tenaga pendidik, dan layanan pendidikan lanjutan agar kualitas pembelajaran dapat berkembang lebih baik.

c. Aksesibilitas sekolah

Jarak tempuh dari Kampung Apuri menuju sekolah tergolong sangat dekat, yakni sekitar tiga hingga lima menit dengan berjalan kaki. Kondisi ini membuat mobilitas warga, khususnya para siswa yang tinggal di dalam kampung, berlangsung efisien tanpa memerlukan moda transportasi tambahan. Namun, bagi siswa yang berasal dari distrik tetangga, perjalanan menuju sekolah membutuhkan usaha lebih karena mereka harus menyeberangi perairan menggunakan perahu sebelum mencapai dermaga kampung. Setelah tiba di dermaga, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju sekolah. Tantangan tersebut kini jauh berkurang sejak tersedia asrama putra dan putri yang berada tidak jauh dari kompleks pendidikan, sehingga siswa dari kampung lain dapat tinggal sementara dan mengikuti kegiatan belajar secara lebih teratur tanpa harus menempuh perjalanan laut setiap hari.

Meskipun akses menuju sekolah relatif mudah, kondisi lingkungan tetap menyimpan risiko tertentu, terutama terkait dinamika air laut. Pasang air laut pada waktu-waktu tertentu dapat menyulitkan perjalanan bagi siswa yang masih bergantung pada transportasi perahu, terutama sebelum mereka menetap di asrama. Situasi ini menuntut kewaspadaan dan penyesuaian waktu perjalanan agar keamanan tetap terjaga. Meski demikian, keberadaan asrama serta kedekatan fasilitas pendidikan dengan permukiman warga Apuri menjadikan proses perjalanan menuju sekolah secara keseluruhan cukup aman, praktis, dan mendukung kelancaran aktivitas pendidikan di kampung tersebut.

3. Keadaan Guru dan Murid

a. Jumlah guru

Tenaga pendidik di Kampung Apuri terdiri dari berbagai latar belakang dan status kepegawaian yang mencerminkan dinamika sistem pendidikan lokal. Di TK Bintang Laut, proses belajar mengajar dijalankan oleh dua pendidik, yaitu satu suster yang memegang peran utama dan satu guru honor yayasan. Pada jenjang pendidikan dasar, SD YPPK St. Fransiskus Xaverius memiliki sepuluh guru yang terdiri atas dua ASN, tiga guru honor sekolah, serta lima guru honor yayasan. Sementara itu, SMP YPPK Lecocq D'Armandville didukung oleh sebelas guru, terdiri dari enam guru honor sekolah dan lima guru honor yayasan. Seluruh guru pada ketiga jenjang pendidikan ini telah difasilitasi rumah dinas yang berada di sekitar kompleks sekolah, sehingga memungkinkan mereka menjalankan tugas dengan lebih optimal tanpa kendala jarak maupun transportasi.

Dari segi akses pendidikan, seluruh sekolah berada sangat dekat dengan permukiman warga, memungkinkan siswa menempuh perjalanan hanya dalam waktu 2–5 menit dengan berjalan kaki. Kondisi ini mendukung tingkat kehadiran siswa yang baik dan mempermudah pelaksanaan kegiatan belajar harian. Meskipun demikian, program belajar nonformal masih terbatas. Kegiatan sekolah minggu diselenggarakan di Gereja Paroki Maria Bintang Laut di Kampung Migiwia, sementara pelatihan keterampilan bagi masyarakat masih berlangsung secara insidental dan tidak dilengkapi dengan tindak lanjut atau pendampingan berkelanjutan. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya penguatan program

pendidikan nonformal agar dapat mendukung perkembangan kompetensi masyarakat secara lebih menyeluruh.

b. Kualifikasi dan kompetensi

Tingkat pendidikan tenaga pendidik di Kampung Apuri menunjukkan kualitas yang cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan setempat. Pada SD YPPK St. Fransiskus Xaverius, seluruh guru yang berjumlah sepuluh orang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), sehingga kompetensinya selaras dengan tuntutan pembelajaran di jenjang sekolah dasar. Dari jumlah tersebut, dua orang guru telah mengantongi sertifikat pendidik, yang menandakan pemenuhan standar profesional sesuai regulasi nasional serta peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan tugas mengajar, pembinaan karakter, dan pengelolaan kelas.

Sementara itu, SMP YPPK Lecocq D'Armandville memiliki sebelas guru dengan latar belakang keilmuan yang lebih beragam, mencakup bidang sosiologi, pendidikan kimia, pendidikan bahasa, PPKn, dan pendidikan matematika. Keragaman disiplin ilmu ini mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang lebih komprehensif dan sesuai struktur kurikulum tingkat menengah. Dari total guru SMP tersebut, delapan di antaranya telah bersertifikasi pendidik, sehingga secara umum kualitas profesional tenaga pengajar berada pada tingkat yang baik. Komposisi pendidikan dan sertifikasi tersebut menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di Kampung Apuri memiliki fondasi sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan.

c. Kehadiran guru

Frekuensi kehadiran guru di sekolah-sekolah yang berada di Kampung Apuri tergolong sangat baik. Seluruh guru menetap di lingkungan sekitar sekolah, sehingga mereka tidak menghadapi hambatan berarti untuk tiba tepat waktu maupun melaksanakan tugas mengajar setiap hari. Kedekatan tempat tinggal dengan lokasi sekolah membuat akses menjadi lebih mudah, bahkan dalam kondisi cuaca kurang bersahabat sekalipun. Situasi ini memastikan bahwa kegiatan belajar-mengajar dapat berlangsung secara konsisten tanpa gangguan yang biasanya muncul akibat faktor transportasi atau kondisi geografis.

Kehadiran guru yang stabil memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran, karena siswa dapat mengikuti proses belajar sesuai jadwal tanpa mengalami kekosongan kelas. Konsistensi tersebut juga mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih teratur dan produktif, serta memperkuat hubungan antara guru, siswa, dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, kondisi geografis Kampung Apuri yang mendukung mobilitas guru turut menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas layanan pendidikan di wilayah tersebut.

4. Partisipasi Siswa dalam Proses Belajar-Mengajar

a. Kehadiran dan keaktifan siswa

Tingkat kehadiran siswa di Kampung Apuri secara umum tergolong baik. Kondisi ini didukung oleh jarak antara rumah dan sekolah yang relatif dekat, sehingga siswa dapat menjangkau sekolah hanya dengan berjalan kaki tanpa menghadapi hambatan berarti. Selain itu, keberadaan fasilitas asrama di dekat lingkungan sekolah memberikan kemudahan bagi siswa-siswi yang berasal dari kampung tetangga. Dengan adanya asrama tersebut, risiko keterlambatan akibat perjalanan menggunakan perahu atau kondisi geografis dapat diminimalkan, sehingga kehadiran mereka tetap stabil dan konsisten sepanjang tahun ajaran.

Dalam proses pembelajaran, keterlibatan siswa juga menunjukkan perkembangan yang positif. Rata-rata siswa aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok, baik di dalam kelas maupun pada kegiatan pembelajaran yang bersifat kolaboratif. Kesesuaian lingkungan belajar, dukungan guru, serta pendekatan pembelajaran yang mendorong interaksi membuat siswa lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan bekerja sama dengan teman sekelas. Selain itu, mereka turut berperan dalam berbagai kegiatan sekolah, yang tidak hanya memperkuat kemampuan sosial, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap proses pembelajaran yang mereka jalani. Dengan demikian, partisipasi siswa baik dalam aspek kehadiran maupun keterlibatan akademik mencerminkan kondisi pendidikan yang cukup kondusif di Kampung Apuri.

b. Dukungan keluarga

Pendampingan belajar di rumah bagi siswa di Kampung Apuri masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu penyebab utamanya adalah

ketidaksesuaian waktu antara anak yang pulang sekolah dan orang tua yang masih berada di tempat kerja. Kondisi ini membuat siswa lebih banyak menghabiskan waktu sore tanpa bimbingan langsung dari orang tua. Pada malam hari, situasi serupa kembali terjadi karena sebagian besar orang tua sudah kelelahan setelah bekerja, sehingga tidak dapat mendampingi anak mengulang pelajaran atau menyelesaikan tugas sekolah. Berbeda dengan siswa-siswi yang tinggal di asrama, mereka memiliki jadwal belajar malam yang teratur dan diawasi, sehingga proses pendampingan berlangsung lebih optimal dan disiplin belajar dapat terjaga dengan baik.

Selain kendala pendampingan, ketersediaan alat belajar seperti buku, seragam sekolah, dan perlengkapan tulis juga belum sepenuhnya memadai. Keterbatasan ini berkaitan dengan akses logistik yang bergantung pada jadwal kapal barang yang sandar di Pelabuhan Apuri. Jika pengiriman mengalami keterlambatan, kebutuhan alat belajar pun tertunda, sehingga siswa kadang harus menyesuaikan diri dengan perlengkapan yang terbatas. Situasi ini berdampak pada kelancaran proses belajar, terutama bagi siswa yang membutuhkan bahan ajar tertentu untuk menunjang kegiatan pembelajaran sehari-hari. Meskipun demikian, masyarakat tetap berupaya memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak sesuai kemampuan, sembari menunggu peningkatan akses distribusi logistik di masa mendatang.

c. Faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi

Rendahnya tingkat partisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran di Kampung Apuri dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan akses transportasi yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Meskipun jarak antarkampung relatif dekat, mobilitas masyarakat, terutama bagi mereka yang berasal dari wilayah pesisir atau kampung tetangga, sering terhambat akibat pasang surut air laut atau gelombang yang tidak menentu. Situasi ini membuat sebagian siswa maupun orang tua enggan melakukan perjalanan ke sekolah atau kegiatan pendidikan tambahan ketika kondisi cuaca tidak mendukung, sehingga partisipasi menjadi tidak konsisten. Ketergantungan pada moda transportasi sederhana seperti perahu juga menambah risiko perjalanan, sehingga keputusan untuk hadir di sekolah atau mengikuti program pendidikan sering kali dipertimbangkan secara hati-hati oleh keluarga.

Selain itu, motivasi belajar yang rendah turut berperan dalam menurunnya partisipasi. Sebagian masyarakat masih memandang hasil belajar tidak memberikan dampak ekonomi yang langsung dirasakan oleh keluarga. Dalam konteks kehidupan sehari-hari yang didominasi oleh aktivitas subsisten, seperti melaut atau berkebun, pendidikan sering kali dianggap sebagai prioritas kedua dibandingkan pemenuhan kebutuhan ekonomi harian. Pandangan ini menyebabkan sebagian orang tua kurang mendorong anak-anak mereka untuk mengikuti kegiatan belajar secara penuh. Kombinasi antara hambatan geografis dan rendahnya persepsi manfaat pendidikan ini menjadikan partisipasi siswa tidak optimal, sehingga diperlukan pendekatan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi kesejahteraan keluarga dan perkembangan kampung.

d. Kegiatan ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler di Kampung Apuri berjalan cukup beragam dan memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi di luar pembelajaran formal. Bidang olahraga menjadi salah satu aktivitas yang paling diminati, terutama sepak bola dan bola voli yang rutin dimainkan pada sore hari di halaman sekolah. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat keterampilan fisik dan sportivitas, tetapi juga mempererat hubungan sosial antarsiswa. Selain olahraga, kegiatan seni budaya juga mendapat tempat penting sebagai sarana pelestarian identitas lokal. Siswa dilibatkan dalam latihan tari seka yang merupakan tradisional dari Suku Kamoro pada momen-momen tertentu, sehingga nilai budaya tetap hidup dan diwariskan kepada generasi muda.

Bagi siswa yang tinggal di asrama dan beragama Katolik, kegiatan pendalaman kitab suci menjadi bagian dari rutinitas religius, terutama selama Bulan Kitab Suci Nasional di bulan september. Pembinaan iman ini dilaksanakan secara terstruktur melalui bimbingan para pendamping asrama dan pastor, sehingga selain memperoleh pemahaman spiritual, siswa juga dibentuk untuk memiliki karakter yang disiplin dan bertanggung jawab. Perpaduan antara olahraga, seni budaya, dan pembinaan iman menjadikan kegiatan ekstrakurikuler di Kampung Apuri sebagai wahana pengembangan diri yang holistik, memperkuat kemampuan akademik

sekaligus membentuk kepribadian siswa agar lebih percaya diri, berintegritas, dan mampu berkontribusi bagi komunitasnya.

5. Pendidikan Non Formal

a. Jenis pendidikan non formal dan penyelenggara

Pendidikan keagamaan di Kampung Apuri berlangsung melalui kegiatan Sekolah Minggu yang menjadi wadah utama pembinaan iman bagi anak-anak. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari Minggu dan dipandu oleh pastor/suster/frater. Melalui Sekolah Minggu, anak-anak diperkenalkan pada nilai-nilai Kristiani, cerita-cerita Alkitab, doa-doa dasar, serta praktik hidup yang mencerminkan kasih, penghargaan, dan tanggung jawab terhadap sesama. Selain penyampaian materi keagamaan, kegiatan ini juga diisi dengan nyanyian rohani, permainan edukatif, dan aktivitas kreatif yang membuat proses belajar lebih menyenangkan. Peran Sekolah Minggu sangat penting dalam membentuk karakter anak sejak dini, memperkuat identitas spiritual mereka, serta menumbuhkan kebiasaan beribadah yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Katolik di Kampung Apuri.

b. Tantangan pengembangan

Ketersediaan instruktur yang kompeten di Kampung Apuri sebenarnya menjadi salah satu modal penting bagi pelaksanaan kegiatan pelatihan atau pembelajaran nonformal. Beberapa warga memiliki kemampuan khusus, baik di bidang kerajinan, pertanian, maupun kegiatan kerohanian, yang dapat dikembangkan sebagai instruktur lokal. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara sistematis karena tidak didukung oleh sarana belajar yang memadai. Fasilitas pelatihan seperti ruang belajar, alat praktik, maupun bahan pendukung sangat terbatas, sehingga kegiatan pengembangan kapasitas sering berjalan tidak optimal dan tidak berkelanjutan.

Selain itu, minat masyarakat untuk terlibat dalam pelatihan masih rendah. Warga cenderung memprioritaskan aktivitas sehari-hari yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, sehingga kesempatan untuk mengikuti pelatihan dianggap kurang mendesak. Kondisi ini diperkuat oleh belum adanya pemahaman yang kuat tentang manfaat jangka panjang dari peningkatan keterampilan. Akibatnya, berbagai potensi pengembangan kapasitas masyarakat

belum berkembang optimal, dan diperlukan upaya yang lebih terarah untuk meningkatkan motivasi, menyediakan fasilitas yang memadai, serta memaksimalkan peran instruktur lokal agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan lebih efektif di Kampung Apuri.

E. Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana

1. Konsep Masyarakat tentang Sehat, Sakit dan Penyakit

a. Pemaknaan "sehat" menurut masyarakat

Masyarakat Kampung Apuri memaknai kesehatan terutama sebagai kemampuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Seseorang dianggap sehat apabila masih mampu bekerja, mendayung perahu, menangkap ikan, atau melakukan pekerjaan rumah tangga dan tugas ekonomi keluarga. Selama tubuh tidak menunjukkan keluhan fisik yang menghambat aktivitas, kondisi tersebut dipahami sebagai sehat. Pemaknaan ini mencerminkan pandangan fungsional terhadap kesehatan, yaitu sehat selama masih bisa bergerak dan berkontribusi bagi keluarga.

Dalam konteks kesehatan ibu dan anak, masyarakat umumnya memandang kehamilan sebagai karunia alamiah yang akan berlangsung selama "sembilan bulan sepuluh hari" hingga melahirkan. Karena dianggap sebagai proses yang wajar dan tidak memerlukan intervensi medis, sebagian ibu jarang memeriksakan kehamilannya ke puskesmas atau tenaga kesehatan. Rendahnya kunjungan antenatal ini berdampak pada kurangnya pemantauan kondisi ibu hamil dan janin.

Kondisi ini turut berpengaruh pada status gizi anak. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah atau balita yang kurang gizi seringkali dianggap biasa selama mereka tetap aktif bergerak dan bermain. Dengan kata lain, tanda-tanda kurang gizi tidak selalu dipandang sebagai masalah kesehatan serius karena masyarakat menilai kesehatan dari kemampuan anak untuk beraktivitas, bukan dari indikator medis atau pertumbuhan fisik.

b. Pemaknaan "sakit"

Masyarakat Kampung Apuri memahami penyakit melalui dua perspektif utama, yaitu sakit secara fisik dan sakit yang berkaitan dengan faktor spiritual atau

adat. Pemahaman ini mempengaruhi cara mereka mengenali gejala dan menentukan langkah penanganan.

Sakit fisik dipahami sebagai kondisi yang muncul akibat faktor lingkungan atau kebiasaan hidup sehari-hari. Beberapa keluhan yang umum terjadi antara lain demam atau badan lemas akibat malaria, batuk karena kena debu, serta luka yang terjadi akibat kurang berhati-hati saat beraktivitas di kebun, sungai atau hutan. Penyakit-penyakit ini dianggap wajar karena sering dialami dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya ditangani secara sederhana sebelum mencari pertolongan medis.

Selain penyebab fisik, masyarakat juga meyakini adanya penyakit yang bersumber dari faktor spiritual atau pelanggaran terhadap norma adat. Dalam perspektif kepercayaan lokal, sakit dapat muncul karena gangguan roh, ketidakseimbangan hubungan dengan alam, atau akibat tindakan yang dianggap melanggar aturan adat. Pada kondisi ini, masyarakat cenderung mencari bantuan tokoh adat atau agama sebelum atau bersamaan dengan upaya pengobatan medis.

Tanda awal seseorang dianggap mulai sakit biasanya dikenali dari perubahan kondisi tubuh yang dianggap tidak biasa. Badan panas-dingin sering dikaitkan dengan “kena angin lewat” atau “angin jahat”, sementara rasa lelah atau pusing dipahami sebagai akibat “salah jalan” ketika bepergian, berjalan melalui tempat-tempat yang dianggap memiliki energi atau kekuatan tertentu. Pemahaman ini mendorong keluarga melakukan penanganan awal secara tradisional, misalnya pijat, ramuan, atau ritual sederhana, sebelum membawa pasien ke puskesmas.

2. Kesehatan

a. Jenis dan ketersediaan fasilitas kesehatan

Akses masyarakat Kampung Apuri terhadap fasilitas kesehatan masih sangat terbatas. Puskesmas hanya tersedia di ibu kota distrik, sementara fasilitas layanan dasar seperti Puskesmas Pembantu, Poskesdes, maupun Polindes tidak ada di kampung. Satu-satunya layanan kesehatan yang tersedia di tingkat kampung adalah



Puskesmas Rawat Inap (dok.ippm)

Posyandu, yang menjadi titik utama pelayanan kesehatan dasar, terutama bagi balita dan ibu hamil. Kendati demikian, layanan Posyandu berlangsung terbatas karena frekuensi kunjungan tenaga kesehatan hanya terjadwal sekali dalam sebulan, bergantung pada kehadiran petugas Puskesmas distrik yang datang ke kampung.

b. Tenaga kesehatan yang tersedia

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kampung Apuri ditopang oleh tenaga medis dari Puskesmas Distrik Mimika Barat yang terdiri atas perawat, bidan, tenaga gizi, serta dokter umum. Kehadiran dokter pada tingkat distrik memungkinkan pemeriksaan dasar, penanganan medis awal, hingga proses rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap di Timika ketika diperlukan. Namun, pelayanan kesehatan di Kampung Apuri sendiri masih bersifat berkala, karena tenaga medis hanya datang sekali dalam sebulan bersamaan dengan pelaksanaan posyandu. Pola kunjungan yang tidak rutin setiap minggu ini menjadi kendala besar bagi masyarakat, terutama saat terjadi kondisi sakit mendadak atau kegawatdaruratan yang membutuhkan penanganan cepat.

Keterbatasan akses transportasi memperburuk situasi, karena perjalanan menuju fasilitas kesehatan yang lebih memadai memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, banyak ibu hamil baru mencari pelayanan kesehatan ketika kondisi sudah darurat, sehingga meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan. Persentase kelahiran di fasilitas kesehatan pun masih rendah, sebab sebagian ibu memilih melahirkan di rumah dengan bantuan dukun kampung yang lebih mudah dijangkau. Berdasarkan pengamatan lapangan, kasus stunting dan anemia pada ibu hamil diduga telah terjadi di Kampung Apuri, meskipun pemantauan status gizi secara sistematis belum dilakukan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan jangkauan layanan kesehatan, edukasi gizi, serta sistem pemantauan yang lebih terstruktur agar kesehatan masyarakat dapat ditangani secara lebih optimal dan berkelanjutan.

3. Gizi

a. Akses pangan bergizi

Akses masyarakat Kampung Apuri terhadap pangan bergizi sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam di sekitar permukiman. Sebagian besar kebutuhan lauk hewani dipenuhi dari hasil tangkapan sungai seperti ikan, udang,

dan kepiting yang dapat diperoleh tanpa biaya dan menjadi sumber protein utama bagi keluarga. Sementara itu, lauk hewani yang harus dibeli seperti ayam, daging, dan telur jarang dikonsumsi karena harganya tidak terjangkau oleh mayoritas rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, masyarakat mengandalkan pangan lokal berupa sagu dari dusun sagu, ubi dari lahan kering, serta sayur-sayuran hutan yang hanya tersedia pada waktu tertentu. Meskipun pola konsumsi ini mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alami, variasinya masih terbatas sehingga belum sepenuhnya menunjang pemenuhan gizi seimbang sepanjang tahun.

Selain memanfaatkan pangan lokal, kebutuhan makanan pokok masyarakat juga bergantung pada beras bantuan pemerintah. Ketergantungan ini memperlihatkan ketahanan pangan yang masih rentan, terlebih ketika distribusi bantuan mengalami keterlambatan atau akses transportasi ke Timika terhambat oleh faktor cuaca dan biaya. Kondisi tersebut berdampak pada pola konsumsi harian yang sederhana dan kurang bervariasi, terutama bagi balita dan ibu hamil yang memerlukan asupan gizi lebih baik. Situasi ini mencerminkan perlunya penguatan sistem pangan lokal, peningkatan edukasi gizi, dan dukungan program ketahanan pangan agar masyarakat Kampung Apuri dapat memperoleh akses pangan bergizi secara lebih berkelanjutan.

b. Program gizi di kampung

Pelaksanaan program gizi di Kampung Apuri masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi kualitas layanan bagi masyarakat, terutama bagi balita. Posyandu balita yang seharusnya menjadi garda terdepan pemantauan status gizi belum dapat menjalankan fungsi secara menyeluruh. Sistem lima meja mulai dari pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, hingga pelayanan kesehatan belum terlaksana dengan baik karena keterbatasan tenaga kader yang terlatih dan minimnya peralatan penunjang. Kondisi ini membuat alur pelayanan menjadi tidak optimal dan beberapa tahapan penting sering kali terlewati.

Kegiatan penimbangan berat badan tetap dilaksanakan pada setiap jadwal posyandu, namun tingkat partisipasi keluarga masih rendah. Sebagian ibu tidak membawa anak secara rutin karena berbagai alasan, seperti jauhnya lokasi posyandu, kesibukan sehari-hari, atau kurangnya pemahaman mengenai pentingnya

pemantauan pertumbuhan. Akibatnya, data perkembangan balita menjadi tidak lengkap dan sulit digunakan untuk menilai situasi gizi secara akurat.

Di sisi lain, pemberian makanan tambahan (PMT) menjadi salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan ketika bahan-bahan tersedia atau ada dukungan dari petugas kesehatan. Menu PMT biasanya disesuaikan dengan pangan yang mudah diperoleh di lingkungan kampung, sehingga lebih menekankan pada pengenyangan dan pemenuhan energi. Meskipun memberikan manfaat jangka pendek, variasi bahan yang terbatas menyebabkan PMT belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan gizi seimbang yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan optimal anak-anak.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan status gizi di Kampung Apuri masih memerlukan penguatan kapasitas kader, penyediaan sarana dasar posyandu, serta peningkatan pemahaman keluarga mengenai pentingnya layanan gizi terpadu bagi balita.

c. Perilaku dan pengetahuan gizi keluarga

Pengetahuan gizi keluarga di Kampung Apuri masih relatif terbatas, sehingga pola konsumsi rumah tangga cenderung sederhana dan minim variasi. Kebiasaan dalam memilih dan mengolah makanan belum mempertimbangkan kebutuhan gizi berdasarkan kelompok usia. Balita dan orang dewasa umumnya mengonsumsi menu yang sama, yang sebagian besar hanya terdiri atas nasi dan lauk tanpa tambahan sayur atau sumber vitamin dan mineral lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai pentingnya gizi seimbang belum sepenuhnya tertanam dalam praktik sehari-hari.

Kebiasaan makan bersama sebagai satu ritual keluarga juga belum berkembang secara kuat. Balita biasanya disuapi oleh ibu dengan porsi yang tidak terukur, sehingga kebutuhan energi dan zat gizi anak sulit dipenuhi secara optimal. Pola makan seperti ini menyebabkan variasi asupan zat gizi menjadi sangat terbatas, terutama pada kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus.

Selain keterbatasan pengetahuan gizi, masyarakat juga dipengaruhi oleh berbagai mitos dan pantangan makanan yang diwariskan secara turun-temurun. Pada ibu hamil, kepercayaan semacam ini berpengaruh besar terhadap pilihan makanan yang dikonsumsi. Misalnya, penyu (teteruga) dianggap dapat

menyebabkan anak lahir dengan kaki berbentuk O, udang diyakini dapat membuat bayi terkena cacar air, daging buaya dipercaya menyebabkan bayi lahir dengan kelebihan jari, dan tikus tanah dianggap membuat bayi memiliki telinga panjang. Kepercayaan tersebut membuat ibu hamil menghindari berbagai sumber protein hewani yang sebenarnya sangat penting bagi kesehatan.

Penghindaran terhadap makanan bergizi ini berdampak langsung pada kecukupan nutrisi ibu hamil. Asupan protein, zat besi, dan mikronutrien lain menjadi tidak terpenuhi, sehingga risiko anemia meningkat dan perkembangan janin berpotensi terganggu. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berkontribusi pada tingginya kasus bayi dengan berat lahir rendah ataupun masalah kesehatan lainnya.

Secara keseluruhan, pola konsumsi di Kampung Apuri menggambarkan perlunya peningkatan edukasi gizi yang lebih intensif, baik untuk rumah tangga secara umum maupun khusus bagi ibu hamil, agar pemenuhan gizi keluarga dapat berlangsung lebih sehat, seimbang, dan berkelanjutan.

d. Ketersediaan sumber pangan lokal

Sumber pangan lokal di Kampung Apuri terutama berasal dari dusun sagu, yang menjadi pusat pengambilan tepung sagu sebagai makanan pokok masyarakat. Sagu memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari karena menjadi sumber karbohidrat utama sekaligus bagian dari tradisi pangan setempat. Berbeda dengan beberapa wilayah lain, masyarakat Apuri tidak memiliki kebun keluarga yang dikelola secara khusus untuk memenuhi kebutuhan sayur-mayur. Akibatnya, ketersediaan sayuran sangat bergantung pada hasil alam yang tumbuh secara alami di sekitar permukiman atau pembelian dari luar kampung. Sementara itu, perairan sungai menyediakan beragam jenis ikan, udang, dan kepiting yang relatif mudah diperoleh dan menjadi sumber protein utama bagi keluarga.

Meskipun sumber pangan lokal cukup beragam, ketahanan pangan masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh kondisi alam. Pada saat pasang air besar, air sungai dapat masuk hingga ke rumah-rumah penduduk, sehingga aktivitas memasak dan pengolahan sagu di dusun menjadi terhambat. Kondisi ini sering menjadi periode rawan pangan karena sayur-sayuran tidak dapat tumbuh dengan baik di lingkungan yang tergenang. Ketika hasil alam menurun, masyarakat harus

membeli sayuran dari Kota Timika, namun biaya transportasi yang tinggi membuat pembelian tersebut tidak selalu terjangkau. Situasi ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kampung Apuri masih rentan dan sangat ditentukan oleh musim serta akses transportasi, sehingga diperlukan upaya penguatan ketahanan pangan berbasis lokal yang lebih berkelanjutan.

4. Keluarga Berencana

a. Pemahaman masyarakat tentang KB

Masyarakat Kampung Apuri pada dasarnya memahami bahwa program Keluarga Berencana (KB) bertujuan membantu mengatur jarak kelahiran, menjaga kesehatan ibu, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun pemahaman ini belum sepenuhnya tercermin dalam praktik sehari-hari, terutama pada pasangan usia subur. Banyak keluarga masih memiliki jumlah anak yang cukup banyak dengan jarak kelahiran yang berdekatan. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya risiko kehamilan berulang, kelelahan fisik pada ibu, serta kemungkinan terjadinya bayi berat lahir rendah (BBLR), terutama pada keluarga dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan.

Di sisi lain, meskipun sebagian pasangan usia subur telah menjadi akseptor KB dan menggunakan metode kontrasepsi modern, penerimaan terhadap alat kontrasepsi masih menghadapi kendala budaya. Sebagian masyarakat memandang bahwa penggunaan kontrasepsi, khususnya metode yang melibatkan pemasangan alat di dalam tubuh, tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai adat dan keyakinan setempat. Kontrasepsi dianggap sebagai “benda asing” yang kurang selaras dengan tradisi, sehingga menimbulkan keraguan, terutama pada pasangan muda dan ibu yang baru melahirkan. Persepsi ini berdampak pada rendahnya adopsi kontrasepsi modern dan menunjukkan perlunya pendekatan penyuluhan yang lebih sensitif terhadap budaya lokal agar program KB dapat diterima secara lebih luas dan efektif di Kampung Apuri.

b. Akses layanan KB

Akses layanan Keluarga Berencana (KB) di Kampung Apuri bergantung pada Puskesmas Kokonao yang menjadi pusat penyediaan alat kontrasepsi sekaligus tempat tenaga kesehatan memberikan penyuluhan serta pelayanan pemasangan. Secara umum, fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk mendukung program KB

sudah tersedia di tingkat distrik. Namun, masyarakat Apuri tetap menghadapi beragam keterbatasan untuk memanfaatkannya secara optimal. Jarak kampung yang cukup jauh, terbatasnya frekuensi kunjungan layanan bergerak, serta kurangnya intensitas penyuluhan membuat informasi dan layanan KB tidak selalu menjangkau seluruh pasangan usia subur secara merata.

Kendala tersebut menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap layanan KB dan tingkat penggunaannya dalam praktik. Banyak keluarga sebenarnya membutuhkan pendampingan kesehatan reproduksi dan pengaturan jarak kelahiran, tetapi akses yang tidak konsisten menyebabkan pemanfaatan layanan KB masih rendah. Situasi ini memperlihatkan pentingnya peningkatan jangkauan layanan, baik melalui penambahan jadwal kunjungan tenaga kesehatan maupun penguatan edukasi yang berkelanjutan, agar program KB di Kampung Apuri dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

c. Frekuensi kelahiran dan tren keluarga

Rata-rata jumlah anak dalam satu keluarga di Kampung Apuri berkisar antara tiga hingga enam orang, mencerminkan kuatnya pola keluarga besar yang masih melekat dalam budaya setempat. Banyak keluarga memandang memiliki banyak anak sebagai bentuk keberlanjutan keturunan sekaligus kekuatan sosial dalam komunitas. Meskipun demikian, dukungan terhadap kesehatan ibu dan anak tetap menjadi perhatian utama, walaupun praktiknya dipengaruhi oleh pola relasi gender yang tradisional. Dalam kehidupan sehari-hari, ibu memikul dua peran sekaligus: sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses reproduksi serta sebagai tenaga produktif yang terlibat dalam aktivitas domestik maupun ekonomi keluarga.

Sementara itu, keterlibatan laki-laki dalam keputusan terkait kesehatan reproduksi, pengaturan kelahiran, maupun pengasuhan anak cenderung lebih rendah. Ketimpangan peran ini berdampak pada dinamika keluarga, termasuk frekuensi kelahiran yang relatif tinggi dan jarak kehamilan yang sering kali berdekatan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan edukasi mengenai Keluarga Berencana serta penataan ulang peran dalam keluarga secara lebih setara, agar kualitas kesehatan ibu dan anak dapat ditingkatkan. Pendekatan yang sensitif terhadap nilai budaya sekaligus mendorong partisipasi laki-laki

menjadi kunci untuk mendorong perubahan yang lebih berkelanjutan di Kampung Apuri.

F. Ekonomi Masyarakat

1. Aktivitas Penduduk

Pola kerja masyarakat Kampung Apuri masih sangat dipengaruhi oleh tradisi dan kedekatan mereka dengan alam. Aktivitas harian sebagian besar penduduk terfokus pada pencarian hasil hutan serta penangkapan ikan, udang, dan kepiting dengan menggunakan peralatan sederhana yang mudah dioperasikan. Jam kerja bersifat fleksibel, menyesuaikan ritme alam dan kondisi perairan. Nelayan umumnya mulai melaut pada dini hari hingga pagi, memanfaatkan kondisi air yang lebih tenang dan peluang tangkapan yang lebih tinggi. Hampir tidak terdapat kegiatan berbasis sektor formal, sehingga stabilitas pendapatan keluarga sangat bergantung pada aktivitas-aktivitas informal yang hasilnya fluktuatif. Lokasi kerja pun berada di sekitar area kampung, baik di sungai, pesisir, maupun dusun sagu yang menjadi salah satu sumber pangan penting.

Sebagian warga memiliki pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, seperti memanen sagu pada musim tertentu atau menjual hasil laut dalam jumlah kecil. Pemuda sering terlibat dalam aktivitas pembangunan kampung, termasuk membantu pekerjaan konstruksi, memperbaiki fasilitas umum, atau bekerja sebagai tenaga bantu dalam kegiatan perikanan. Perempuan pun memegang peran penting, tidak hanya mengurus kebutuhan rumah tangga, tetapi juga terlibat dalam pengolahan hasil tangkapan, menyiapkan perlengkapan untuk aktivitas melaut, serta melakukan usaha kecil seperti menjual makanan. Kombinasi kegiatan utama dan pekerjaan sampingan ini mencerminkan struktur penghidupan masyarakat Apuri yang bercorak campuran, mempertahankan praktik tradisional sembari perlahan beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi modern, namun tetap sangat bergantung pada sumber daya alam lokal dan sektor informal.

2. Kepemilikan Modal

Kepemilikan modal produktif di Kampung Apuri masih bertumpu pada aset-aset tradisional yang digunakan untuk mendukung aktivitas harian masyarakat. Sebagian besar keluarga memiliki perahu kayu, jaring sederhana, alat pancing, serta perkakas

manual untuk kegiatan mencari hasil hutan dan menangkap ikan. Hanya sebagian kecil rumah tangga yang telah memiliki perahu bermesin atau pondok kecil yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil tangkapan maupun titik awal aktivitas perdagangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi masyarakat masih sangat bergantung pada peralatan sederhana dan tenaga kerja keluarga, sehingga skala usaha yang dijalankan umumnya kecil dan terbatas.

Kepemilikan aset rumah tangga juga menunjukkan variasi yang cukup mencolok antarkeluarga. Mayoritas penduduk Apuri telah memiliki telepon seluler sebagai sarana komunikasi, tetapi peralatan dasar rumah tangga seperti elektronik dan perlengkapan dapur yang memadai belum dimiliki secara merata. Khusus warga pendatang atau migran cenderung memiliki aset elektronik berdaya besar seperti televisi, kulkas, atau bahkan genset pribadi, sehingga terdapat perbedaan yang nyata dalam tingkat kenyamanan hidup. Sumber modal usaha sebagian besar berasal dari tabungan keluarga maupun bantuan pemerintah kampung, sementara akses terhadap pinjaman formal masih rendah. Bantuan berupa perahu, jaring, atau modal ekonomi desa menjadi penopang penting bagi pengembangan usaha kecil, meskipun modal tersebut umumnya dikelola untuk kebutuhan sehari-hari dan belum diarahkan pada pengembangan usaha berkelanjutan.

Pola pengelolaan modal masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga keberlanjutan usaha sering terhambat oleh pendapatan yang tidak stabil serta ketergantungan tinggi pada kondisi alam, terutama bagi nelayan dan pencari hasil hutan. Ketimpangan kepemilikan modal tetap terlihat, terutama antara keluarga nelayan yang memiliki perahu motor tempel seperti speedboat atau longboat dengan keluarga yang hanya mengandalkan alat tangkap tradisional. Meski demikian, praktik gotong royong yang kuat di masyarakat membantu menjaga keseimbangan sosial, sehingga keterbatasan modal tidak menjadi hambatan mutlak dalam keberlangsungan penghidupan mereka.

3. Kelembagaan Ekonomi

Keberadaan layanan keuangan melalui Bank Papua, khususnya Kas Bank Papua Kokonao yang beroperasi di Atapo, menjadi penanda penting dinamika ekonomi masyarakat setempat. Kehadiran layanan perbankan di tingkat lokal memudahkan warga dalam melakukan berbagai transaksi, mulai dari penarikan tunai, penyimpanan

dana, hingga layanan transfer yang menunjang aktivitas perdagangan dan arus barang di pelabuhan. Frekuensi transaksi yang tinggi menunjukkan bahwa Apuri memiliki perputaran ekonomi yang aktif, dipengaruhi oleh mobilitas penduduk, kegiatan bongkar muat, serta interaksi dagang antara warga kampung dan masyarakat pendatang. Bank Papua tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan finansial, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi formal. Keberadaannya memastikan sirkulasi uang lebih aman dan teratur, sejalan dengan perkembangan Apuri sebagai kawasan pelabuhan yang terus bertumbuh. Pembangunan jembatan terapung oleh pemerintah kabupaten turut meningkatkan aksesibilitas perahu dan memperlancar pergerakan penduduk, sehingga semakin mendorong aktivitas ekonomi di wilayah Kampung Apuri dan sekitarnya.

Meskipun lembaga ekonomi lokal menunjukkan tingkat keaktifan yang relatif stabil, partisipasi masyarakat dalam memperluas atau mengembangkan usaha masih terbatas. Minimnya dukungan dari pemerintah, program CSR perusahaan, maupun organisasi keagamaan menyebabkan kapasitas kelembagaan ekonomi belum berkembang secara optimal. Bantuan yang pernah diberikan umumnya bersifat jangka pendek dan tidak disertai pendampingan berkelanjutan, sehingga belum mampu menciptakan penguatan ekonomi yang bersifat struktural. Situasi ini menegaskan pentingnya intervensi yang lebih terarah, sistematis, dan berkesinambungan untuk memperkuat fondasi ekonomi Kampung Apuri. Pendekatan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

4. Harga Barang dan Bahan Makanan

Harga bahan pokok di Kampung Apuri umumnya lebih tinggi dibandingkan di kota Timika karena faktor transportasi, jarak pengiriman, serta ketergantungan pada pasokan dari luar kampung. Barang-barang kebutuhan rumah tangga sebagian besar dipasok melalui jalur laut dan Sungai menuju Pelabuhan Atapo, kemudian didistribusikan ke kios-kios lokal yang berada di sekitar kampung. Kondisi ini menyebabkan harga cenderung fluktuatif sepanjang tahun, terutama pada musim gelombang tinggi ketika mobilitas kapal terbatas dan biaya angkut meningkat.

Tabel berikut menggambarkan kisaran harga bahan pokok yang umum dijual di Kampung Apuri:

Tabel 3.7 Harga Kebutuhan SEMBAKO, Pakaian dan Sekolah
Di Kampung Apuri Tahun 2025

No.	Jenis Komoditas	Harga (Rp)/Satuan	Keterangan
I	**Sayuran, buah, ubi, hasil laut**		
01.	Kangkung dan bayam	5.000/ikat	Kecil/besar
02.	Tomat	5.000/tumpuk	
03.	Cabe	5.000/tumpuk	
04.	Pisang	20.000/sisir	Kecil/besar
05.	Ubi-ubian	50.000/tumpuk	
06.	Sagu	30.000/potong	
07.	Ikan basah	15.000/ekor	
08.	Udang Laut	45.000/kg	
09.	Udang Kali	3.000/ekor	
10.	Karaka	30.000/ekor	
II	**Jenis sembilan bahan pokok**		
01.	Beras	18.000/kg	
02.	Gula pasir	25.000/kg	
03.	Garam	9.000/bungkus	
04.	Minyak goreng	30.000/liter	
05.	Minyak tanah	15.000/liter	
06.	Susu kaleng	12.000/kaleng	Cap Nona
07.	Supermi	5.000/bungkus	
08.	Kopi	8.000/bungkus	
09.	Telur	5.000/buah	
10.	Sabun	5.000/batang	
III	**Jenis rokok**		
01.	Gudang garam filter kecil	35.000/bungkus	
02.	Gudang garan filter besar	45.000/bungkus	
03.	Shag jenis anggur Kupu	8.000/bungkus	
04.	TROY	35.000/bungkus	
IV	**Pakain dan alat tulis**		
01.	Baju T-shirt	60.000/buah	*All Size*
02.	Kemeja	60.000/buah	
03.	Kain sarung	50.000/buah	
04.	Buku tulis	3.000/buah	
05.	Bolpoint	5.000/buah	
06.	Pensil	3.000/buah	
V	**Jenis usaha pertanian**		
01.	Kelapa	1000/buah	
VI	**Jenis bahan bakar minyak (BBM)**		
01.	Bensin	18.000/liter	
02.	Minyak tanah	15.000/liter	

Sumber: Data Primer, 2025

Stabilitas harga bahan pokok di Kampung Apuri sangat dipengaruhi oleh kelancaran distribusi barang dari Kota Timika sebagai pusat pasokan utama. Sepanjang tahun, harga cenderung fluktuatif, terutama pada musim gelombang tinggi ketika kapal pengangkut sulit beroperasi. Pada periode cuaca buruk atau ketika pasokan terlambat tiba, harga komoditas dapat meningkat secara signifikan karena ketersediaan barang menurun serta bila adanya pencaitan dana kampung maupun

bantuan sosial. Sebaliknya, ketika jalur transportasi laut beroperasi normal dan pasokan masuk secara rutin, harga relatif stabil dan lebih mudah dijangkau masyarakat. Faktor lain yang menentukan tinggi rendahnya harga termasuk biaya transportasi laut, jarak pengiriman, serta jenis komoditas yang sebagian besar tidak diproduksi secara lokal.

Dibandingkan dengan harga di Kota Timika, rata-rata harga bahan pokok di Kampung Apuri lebih tinggi sekitar 10-30 persen. Selisih ini terutama terlihat pada barang-barang seperti beras, minyak goreng, telur, dan gula yang sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar kampung. Perbedaan harga tersebut tidak hanya disebabkan biaya angkut, tetapi juga risiko distribusi yang lebih besar akibat kondisi geografis pesisir yang dipengaruhi musim dan cuaca. Situasi ini memperkuat posisi kios-kios lokal sebagai penyedia kebutuhan pokok bagi masyarakat, meskipun harga yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan pasar di kota Timika.

Akses warga kampung Apuri terhadap pasar sangat mudah, dimana seluruh kebutuhan harian dipenuhi melalui kios yang tersebar di kampung. Apabila warga ingin membeli barang dalam jumlah lebih besar atau mencari harga yang lebih murah, mereka harus menuju Kota Timika dengan perjalanan laut selama 60-90 menit tergantung gelombang dan kondisi cuaca. Selain memerlukan waktu, perjalanan tersebut membutuhkan biaya tambahan untuk transportasi, sehingga tidak semua keluarga memilih opsi tersebut. Bagi sebagian besar rumah tangga, membeli langsung di kios lokal menjadi pilihan paling praktis meskipun harganya relatif lebih mahal. Keterbatasan akses inilah yang menjadikan kios sebagai lembaga ekonomi yang sangat vital dalam mendukung keberlangsungan hidup masyarakat Kampung Apuri.

5. Potensi dan Peluang Ekonomi

Kampung Apuri memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan beragam, mulai dari sagu sebagai bahan pangan utama, hasil perikanan seperti ikan dan udang yang tersedia sepanjang tahun, hingga kekayaan wisata alam di kawasan pesisir yang menawarkan pemandangan khas dan lingkungan yang masih asri. Potensi ini membuka peluang besar untuk pengembangan ekonomi berbasis UMKM, misalnya pengolahan sagu menjadi produk siap konsumsi, usaha penjualan hasil tangkapan laut, hingga jasa wisata sederhana yang memanfaatkan panorama alam kampung. Peluang-peluang tersebut sangat relevan untuk dikembangkan karena selaras dengan aktivitas

harian masyarakat dan dapat memberikan nilai tambah ekonomi jika dikelola secara terarah.

Namun, sebagian besar potensi tersebut masih belum tergarap optimal. Minimnya keterampilan pengolahan, akses permodalan yang terbatas, serta belum adanya manajemen usaha yang kuat menjadi hambatan utama. Tantangan lain seperti keterbatasan sarana produksi, jaringan pemasaran yang sempit, serta ketergantungan pada kondisi cuaca turut mempengaruhi keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal. Upaya memaksimalkan potensi alam Kampung Apuri membutuhkan dukungan eksternal yang lebih konsisten, baik dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun perusahaan yang memiliki program pemberdayaan. Dukungan tersebut dapat berupa pelatihan, pendampingan usaha, penyediaan sarana produksi, hingga pembukaan akses pasar, sehingga potensi ekonomi kampung dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

6. Tingkat Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kampung Apuri secara umum masih tergolong rendah, dengan rata-rata pendapatan rumah tangga berada di bawah Rp1.000.000 per bulan dan berada di bawah garis kemiskinan Kabupaten Mimika tahun 2025. Kondisi ekonomi ini menyebabkan sebagian besar keluarga memiliki daya beli yang terbatas serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Sebaran kesejahteraan pun relatif seragam antar-RT, dengan mayoritas warga hidup dalam kemiskinan, kecuali sebagian kecil penduduk migran yang memiliki usaha kecil dan berada pada kondisi ekonomi yang lebih stabil. Meskipun jumlahnya sedikit, keberadaan kelompok ini turut memengaruhi perputaran ekonomi lokal.

Akses masyarakat terhadap layanan dasar juga masih sangat terbatas. Keterbatasan transportasi menjadi hambatan utama bagi mobilitas warga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan maupun kesehatan. Layanan pendidikan hanya tersedia hingga tingkat SMP, sehingga anak-anak yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA atau perguruan tinggi harus melakukan perjalanan jauh ke kampung lain atau ke kota. Kondisi serupa terjadi pada pelayanan kesehatan, di mana fasilitas kesehatan terdekat berada di tingkat distrik dan tidak tersedia secara rutin di kampung. Dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi, sebagian besar keluarga mengandalkan pangan lokal

seperti sagu, ikan, dan hasil kebun dengan pola makan rata-rata dua kali sehari, sedangkan biaya pendidikan dasar relatif tidak membebani karena adanya layanan gratis dari pemerintah.

Berbagai program perlindungan sosial seperti PKH dan BLT telah hadir di Kampung Apuri, namun implementasinya belum menjangkau seluruh warga yang berhak. Ketidakmerataan ini terutama disebabkan oleh lemahnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, seperti e-KTP dan Kartu Keluarga, sehingga banyak warga tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Selama 5-10 tahun terakhir, tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung stagnan tanpa peningkatan signifikan. Faktor geografis, keterbatasan aksesibilitas, serta minimnya peluang ekonomi menjadi tantangan utama yang menghambat upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat Kampung Apuri secara menyeluruh.

G. Keamanan dan Ketertiban

1. Kejadian Masalah Keamanan dan Ketertiban

Situasi keamanan dan ketertiban di Kampung Apuri pada umumnya berada dalam kondisi yang cukup stabil, ditandai dengan minimnya kejadian yang mengganggu kehidupan masyarakat secara luas. Gangguan yang muncul bersifat insidental dan tidak berulang dalam jangka panjang. Beberapa kasus yang pernah terjadi meliputi perkelahian antarwarga, keributan kecil, serta konflik dalam rumah tangga yang biasanya dipicu oleh persoalan internal keluarga. Konsumsi minuman beralkohol baik yang berasal dari luar kampung maupun produksi lokal seperti bobo menjadi salah satu faktor utama yang memicu perilaku tidak terkendali pada sebagian warga, terutama kalangan anak muda. Selain itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meskipun jumlahnya sangat terbatas, tetap menjadi perhatian karena berkaitan dengan tekanan ekonomi, kecemburuan, serta permasalahan relasi keluarga.

Di luar gangguan sosial, ancaman keamanan yang bersumber dari lingkungan alam juga ada meski dengan intensitas yang sangat rendah. Warga yang beraktivitas di sungai, rawa, atau hutan terkadang berhadapan dengan kehadiran ular atau buaya, sementara pencari hasil hutan sesekali menghadapi risiko gigitan ulat. Meskipun kejadian ini jarang terjadi, potensi bahayanya menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja langsung memanfaatkan sumber

daya alam. Secara umum, Kampung Apuri tidak memiliki zona atau lokasi yang dikategorikan sebagai daerah rawan; gangguan keamanan berlangsung sporadis dan tidak terikat pada waktu tertentu.

Kelompok yang paling rentan mengalami dampak gangguan keamanan adalah anak muda yang terpapar konsumsi alkohol, perempuan dan anak yang menghadapi potensi kekerasan domestik, serta warga yang bekerja di kawasan hutan dan perairan. Faktor-faktor penyebabnya meliputi konsumsi miras, ketegangan emosional dalam keluarga, minimnya pengawasan, dan kondisi ekologis yang berisiko. Dampak gangguan ini biasanya berupa meningkatnya rasa takut, kecemasan, serta kehati-hatian masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, berkat kuatnya sistem sosial internal, mekanisme penyelesaian masalah secara kekeluargaan, serta peran tokoh adat dan agama dalam menjaga keharmonisan, stabilitas keamanan Kampung Apuri tetap terjaga dan dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat setempat.

2. Penanganan Masalah Keamanan dan Ketertiban

Keamanan di Kampung Apuri dikelola melalui sistem kelembagaan lokal yang menempatkan Linmas sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban. Kehadiran mereka memberikan rasa aman bagi warga, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan kampung dalam menghadapi potensi gangguan berskala kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai persoalan sosial umumnya dapat diselesaikan secara internal melalui mekanisme komunikasi dan mediasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, aparat kampung, serta unsur Linmas. Proses penyelesaian ini dilakukan secara cepat, terbuka, dan berlandaskan prinsip kekeluargaan, sehingga mampu mencegah konflik berkembang dan tetap menjaga harmoni hubungan antarwarga.

Upaya pencegahan gangguan keamanan dilakukan melalui penguatan komunikasi sosial, pengawasan lingkungan secara rutin oleh Linmas, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam memberikan imbauan mengenai ketertiban, terutama pada momen-momen yang berpotensi menimbulkan kerawanan, seperti acara adat, konsumsi alkohol, atau perselisihan dalam keluarga. Meski demikian, tantangan tetap ada, khususnya karena jarak Kampung Apuri yang cukup jauh dari Pos Polisi Sektor (Polsek) Mimika Barat maupun Pos Komando Rayon Militer (Koramil) 1710-01/Kokonau yang berada di Kampung Atapo. Keterbatasan tersebut menjadikan

penguatan kapasitas keamanan lokal serta peningkatan koordinasi dengan Koramil sebagai aspek penting untuk memastikan stabilitas dan ketertiban Kampung Apuri tetap terjaga.

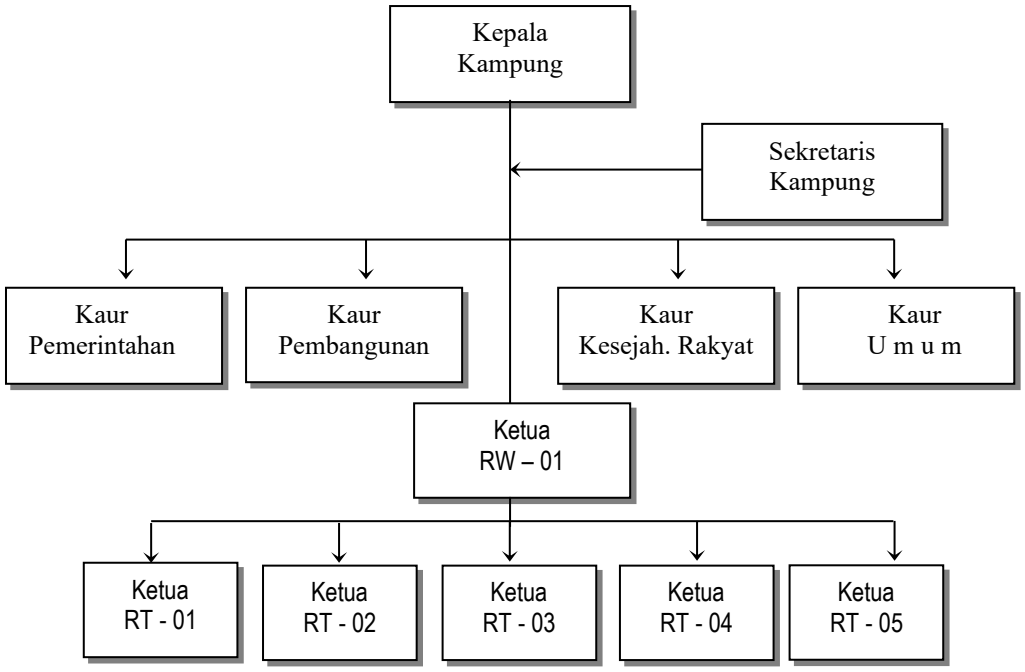
H. Kelembagaan Kampung

1. Lembaga Pemerintah

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kampung Apuri dipimpin oleh seorang Kepala Kampung (Theoudorus Takati) yang dibantu oleh Sekretaris Kampung (Alex Dumatbun), para Kepala Urusan (Kaur) meliputi Kaur Pemerintahan (Elisabeth Takati), Kaur Kesejahteraan Rakyat (Beny Sikora), dan Kaur Pembangunan (Fransiskus Takati), Kaur Umum (Wilhelmus Takati). Perangkat kewilayahan yang terdiri atas 5 Ketua RT yaitu RT-1 (Paskalina Tawer), RT-2 (Yoakim Putaka), RT-3 (Alex Tonenggo), RT-4 (Yohannes Mamoyao) dan RT-5 (Paskalis Uringkara).

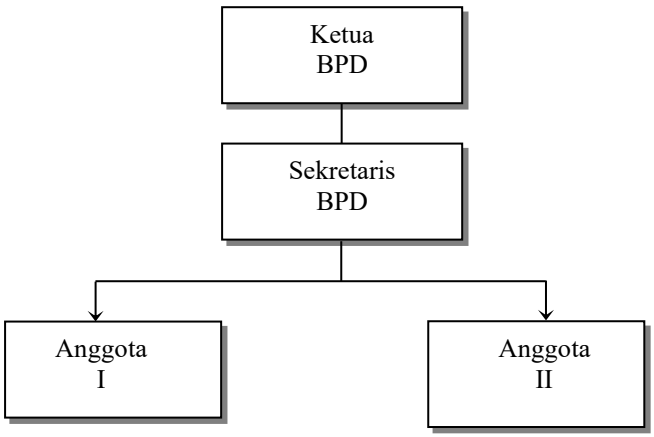
Struktur ini membentuk tata kelola pemerintahan Kampung Apuri yang berfungsi menjalankan layanan dasar, melaksanakan pembangunan, serta mengoordinasikan berbagai urusan masyarakat di tingkat paling bawah. Melalui pembagian tugas yang jelas tersebut memastikan setiap aspek pemerintahan berjalan teratur dalam urusan pelayanan publik.

Gambar 3.1. Struktur Pemerintahan Kampung Apuri



Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menjadi mitra Kepala Kampung dalam proses pengambilan keputusan, terdiri dari Ketua (Bernarda Takati), Sekretaris (Yakobus Magai), dengan 2 orang Anggota-1 (George Karyau) dan Anggota-2 (Yosep Sikora). Adapun struktur BPD di kampung Apuri sebagai berikut:

Gambar 3.2. Struktur BPD Kampung Apuri



2. Lembaga Kemasyarakatan

Kampung Apuri memiliki struktur kelembagaan sosial yang berperan penting dalam menjaga ketertiban, keharmonisan, dan keberlangsungan nilai-nilai budaya masyarakat. Kelembagaan adat tetap menjadi acuan utama dalam mengatur norma kehidupan sehari-hari, menyelesaikan perselisihan ringan, serta melestarikan tradisi lokal. Tokoh adat masih dihormati oleh warga karena dianggap sebagai penjaga kearifan dan identitas komunitas. Meskipun perannya lebih bersifat sosial-kultural, lembaga adat menjadi pilar yang memastikan stabilitas sosial tetap terjaga, terutama dalam relasi antarwarga dan penguatan nilai-nilai kolektif yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Selain kelembagaan adat, lembaga agama memegang pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Kampung Apuri. Mayoritas warga beragama Katolik dan tergabung dalam Komunitas Basis (Kombas) yang berada di bawah Gereja Paroki Maria Bintang Laut. Kombas tidak hanya berfungsi sebagai wadah pembinaan iman melalui ibadah rutin, ibadah sabda, Rorasio pada bulan Mei, dan devosi kepada Maria pada bulan Oktober, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan sosial yang mempererat hubungan antarwarga. Tingginya tingkat partisipasi dalam setiap kegiatan keagamaan

menunjukkan solidaritas yang kuat dan keberlanjutan tradisi keagamaan yang telah lama mengakar.

Kolaborasi antara lembaga adat, lembaga agama, dan pemerintah kampung berjalan harmonis dan saling menguatkan. Pemerintah kampung turut mendukung berbagai kegiatan sosial-keagamaan mengingat peran sentralnya dalam membangun ketertiban, memperkuat moralitas warga, dan memelihara rasa kebersamaan di tingkat komunitas. Kerja sama lintas lembaga ini memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam menciptakan lingkungan yang rukun, toleran, dan saling menopang. Secara keseluruhan, keberadaan kelembagaan adat dan agama di Kampung Apuri menjadi fondasi utama ketahanan sosial sekaligus motor penggerak aktivitas kolektif yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3. Lembaga Politik

Masyarakat Kampung Apuri menunjukkan perilaku politik yang semakin matang, tercermin dari tingginya tingkat partisipasi warga dalam Pemilu Legislatif dan Pilkada Tahun 2024. Hampir seluruh penduduk yang memiliki hak pilih hadir di TPS dan berpartisipasi secara bertanggung jawab, menandakan bahwa kesadaran politik di kampung ini terus berkembang. Antusiasme warga tidak sekadar hadir saat hari pemungutan suara, tetapi juga terlihat dari keterlibatan mereka dalam mengikuti informasi politik, memahami pilihan yang tersedia, serta menjaga suasana kampung tetap tertib selama proses pemilu berlangsung. Kondisi ini menunjukkan adanya pemahaman yang semakin baik mengenai pentingnya suara masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Kelancaran penyelenggaraan pemilu di Kampung Apuri merupakan hasil koordinasi yang solid antara berbagai pihak terkait. Lembaga penyelenggara pemilu mulai dari KPU Mimika, PPD Distrik Mimika Barat, hingga KPPS Kampung Apuri bekerja sama secara intens dengan pemerintah kampung, tokoh adat, dan perwakilan partai politik. Sinergi ini menciptakan suasana yang kondusif dan memastikan setiap tahapan pemilu berlangsung sesuai prosedur, mulai dari distribusi logistik, pemungutan suara, hingga penghitungan hasil akhir. Kehadiran tokoh adat dan pemerintah kampung dalam proses pengawasan turut memperkuat legitimasi dan rasa kepercayaan warga terhadap mekanisme demokrasi.

Kolaborasi yang terbangun tersebut memberikan kontribusi besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu. Setiap potensi gangguan dapat diantisipasi melalui komunikasi yang baik antara pihak penyelenggara dan masyarakat. Transparansi selama proses penghitungan suara juga menjadi aspek penting yang dijaga untuk memastikan hasil yang diterima publik benar-benar mencerminkan pilihan masyarakat Apuri. Secara keseluruhan, pelaksanaan pemilu di Kampung Apuri tidak hanya menunjukkan komitmen warga terhadap demokrasi, tetapi juga memperlihatkan efektivitas kolaborasi antar-lembaga dalam menciptakan proses politik yang jujur, adil, dan terpercaya.

4. Lembaga Kamtibmas

Kelembagaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kampung Atapo ditopang oleh keberadaan Lembaga Kamtibmas melalui Kamra dan Linmas yang berperan aktif dalam menjaga stabilitas sosial kampung. Lembaga ini terlibat langsung dalam pengamanan kegiatan masyarakat, pengawasan lingkungan, serta pencegahan potensi gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun pada momen tertentu seperti kegiatan adat, keagamaan, dan agenda pemerintahan kampung. Keaktifan Kamra dan Linmas mencerminkan kuatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga rasa aman, memperkuat solidaritas sosial, serta mendukung terselenggaranya kehidupan kampung yang tertib, kondusif, dan harmonis.

I. Sarana dan Prasarana

1. Transportasi

Aksesibilitas darat di Kampung Apuri ditopang oleh keberadaan jalan poros distrik, yakni Jalan Cenderawasih yang telah dibangun dengan konstruksi beton oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum. Jalan utama dengan lebar sekitar tiga meter ini menjadi jalur vital bagi mobilitas warga, baik untuk aktivitas ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik. Selain itu, sebagian besar jalan lingkungan di Kampung Apuri yang masih berada dalam satu kawasan juga telah dibangun menggunakan



Perbaikan Jalan Poros (dok.ippm)

beton. Kondisi jalan kampung secara umum cukup baik dan mendukung pergerakan masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa ruas yang belum tersambung sepenuhnya sehingga memerlukan peningkatan agar keterhubungan antarbagian kampung dapat semakin optimal.

Di sisi pesisir, Kampung Apuri memiliki dermaga umum yang berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar bagi warga dari kampung-kampung tetangga di distrik sekitar. Fasilitas ini menjadi prasarana penting bagi masyarakat yang mengandalkan transportasi laut dalam aktivitas harian mereka Dengan demikian, kombinasi akses darat dan laut yang tersedia menjadikan Kampung Apuri memiliki konektivitas yang semakin baik untuk mendukung dinamika kehidupan masyarakat.



Dermaga Kampung Apuri (dok.ippm)

2. Air Bersih dan Sanitasi

Akses air bersih di Kampung Apuri masih sangat terbatas dan bergantung pada kondisi alam setempat. Sebagian besar warga memanfaatkan bak penampungan air hujan sebagai sumber utama untuk kebutuhan sehari-hari, sementara sumur gali baru digunakan pada musim kemarau. Namun, kualitas air sumur sering berubah akibat pengaruh pasang surut sehingga tidak selalu layak dikonsumsi. Dalam situasi ketika penampungan air hujan kosong atau kualitas air sumur menurun, masyarakat terpaksa menggunakan air sungai untuk kebutuhan dasar seperti mandi dan mencuci. Ketergantungan pada sumber air alami ini menyebabkan ketersediaan air bersih sangat berfluktuasi dan belum mampu menjamin kebutuhan warga secara konsisten.

Dari sisi sanitasi, sebagian besar rumah tangga telah memiliki jamban keluarga dengan septictank sederhana yang dibangun terpisah dari bangunan rumah. Meski demikian, masih terdapat keluarga yang bergantung pada fasilitas sanitasi milik tetangga karena keterbatasan sarana dan belum



WC keluarga yang tidak layak (dok.ippm)

tersedianya bangunan permanen yang memadai. Di sisi lain, pengelolaan sampah masih belum terorganisasi dengan baik; warga umumnya membakar sampah di sekitar rumah atau membuangnya secara bebas karena belum ada layanan pengangkutan maupun lokasi pembuangan khusus yang disediakan.

Kondisi lingkungan permukiman turut dipengaruhi oleh minimnya fasilitas drainase dan penerangan. Tidak adanya saluran pembuangan di sekitar rumah menjadikan kawasan permukiman mudah tergenang saat hujan lebat atau ketika air pasang naik.

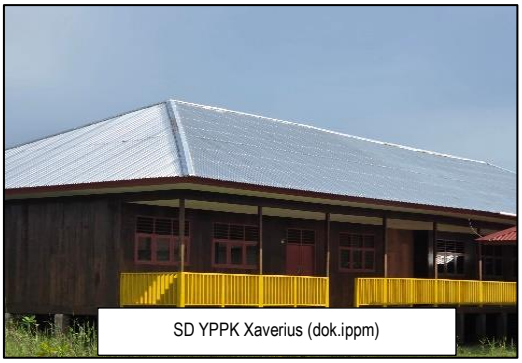
3. Penerangan / Energi

Sumber energi listrik di Kampung Apuri berasal dari jaringan PLN yang didukung oleh penggunaan genset sebagai pasokan tambahan ketika diperlukan. Layanan listrik hanya beroperasi selama 12 jam setiap hari, dimulai pada pukul 18.00 hingga 06.00 pagi, sehingga aktivitas masyarakat pada siang hari tidak bergantung pada listrik. Pola penyalaan ini telah menjadi kebiasaan yang menyesuaikan dengan ritme kehidupan warga, terutama untuk penerangan malam hari.

Meskipun jaringan listrik sudah menjangkau sebagian besar wilayah, kondisi pasokan masih belum stabil. Pemadaman listrik kerap terjadi, terutama ketika pasokan bahan bakar bagi pembangkit PLN menipis atau terlambat dikirim. Situasi ini membuat masyarakat harus siap dengan penggunaan genset atau lampu minyak sebagai sumber penerangan cadangan. Kendati demikian, tingkat akses listrik rumah tangga tergolong tinggi; sekitar 90 persen rumah sudah teraliri listrik dan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk kegiatan sehari-hari. Keberadaan listrik yang relatif merata ini menjadi modal penting bagi peningkatan kualitas hidup, meskipun stabilitas pasokan masih membutuhkan perhatian serius.

4. Pendidikan

Lembaga pendidikan di Kampung Apuri terdiri atas tiga satuan utama, yaitu TK Bintang Laut, SD YPPK St. Fransiskus Xaverius, dan SMP YPPK Lecocq D'Armandville. Ketiganya berperan sebagai pusat pendidikan dasar bagi anak-anak di Apuri dan kampung sekitar. Secara



SD YPPK Xaverius (dok.ippm)

umum, kondisi fisik bangunan menunjukkan variasi kualitas. Bangunan TK masih berada dalam kondisi baik dan layak digunakan. Namun, sebagian ruang kelas di SD mengalami kerusakan cukup parah sehingga tidak lagi memenuhi syarat kelayakan. Situasi yang lebih memprihatinkan terlihat pada SMP, di mana hampir seluruh bangunan tidak layak digunakan akibat kerusakan struktur, terutama tiang penyangga yang sudah lapuk dan membahayakan keselamatan siswa maupun guru. Kondisi ini menunjukkan perlunya revitalisasi infrastruktur pendidikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman.

Sumber daya pendidik di ketiga sekolah tersebut terdiri atas guru tetap yayasan, guru PNS, serta guru honor meskipun jumlah guru honor relatif terbatas. Keberadaan rumah guru yang berlokasi tidak jauh dari lingkungan sekolah turut membantu kelancaran proses pembelajaran karena memudahkan guru hadir dan berinteraksi dengan masyarakat. Dari sisi akses, jarak antara permukiman dan sekolah cukup dekat sehingga anak-anak dapat berjalan kaki untuk berangkat sekolah. Kondisi ini memberikan keuntungan tersendiri bagi siswa, terutama dalam menjaga tingkat kehadiran serta memudahkan orang tua mengawasi aktivitas pendidikan anak.

Selain kegiatan belajar formal, sekolah-sekolah di Apuri juga menyelenggarakan program belajar berbasis kebutuhan lokal. Sekolah minggu menjadi sarana penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai keagamaan, sementara program tambahan 3M (menulis, membaca, dan menghitung) ditujukan bagi siswa yang masih mengalami kesulitan dasar dalam proses belajar. Sarana pendukung pendidikan seperti perpustakaan, alat peraga, dan jaringan internet tersedia, tetapi pemanfaatan internet masih bergantung pada layanan Starlink karena tidak adanya jaringan konvensional yang stabil. Ketersediaan sarana yang terbatas namun tetap berfungsi ini memberikan ruang bagi pengembangan kualitas pendidikan apabila dukungan infrastruktur dan sumber daya dapat ditingkatkan secara lebih berkelanjutan.

5. Kesehatan

Pelayanan kesehatan di Kampung Apuri berjalan melalui perpaduan antara fasilitas dasar yang tersedia di kampung dan akses cepat ke layanan medis formal. Posyandu menjadi pusat pelayanan kesehatan tingkat kampung dan rutin diselenggarakan sebulan sekali pada akhir bulan sebagai wadah pemantauan tumbuh kembang balita, pemeriksaan kesehatan ibu, serta edukasi gizi. Dukungan tenaga

kesehatan relatif memadai karena terdapat petugas medis tetap di puskesmas yang melayani masyarakat setiap hari, disertai kunjungan berkala ke kampung untuk memastikan pemantauan kesehatan berlangsung optimal. Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan tergolong sangat mudah, mengingat jarak ke puskesmas maupun rumah sakit hanya membutuhkan waktu tempuh sekitar tiga hingga lima menit, sehingga kondisi darurat maupun kebutuhan konsultasi medis dapat ditangani dengan cepat. Meski demikian, malaria masih menjadi isu kesehatan utama yang memerlukan perhatian berkelanjutan melalui upaya pencegahan, deteksi dini, dan edukasi lingkungan. Program kesehatan seperti imunisasi dan pemantauan gizi balita terus digalakkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mencegah masalah kesehatan yang dapat menghambat perkembangan anak dan kesejahteraan keluarga di Kampung Apuri.

6. Ekonomi

Masyarakat Kampung Apuri menggantungkan mata pencaharian utamanya pada sektor perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Letak kampung yang berdampingan dengan wilayah perairan membuat aktivitas menangkap ikan, udang, dan hasil laut lainnya berlangsung hampir setiap hari. Perikanan tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga komoditas penting yang dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Pola penangkapan masih dilakukan secara tradisional menggunakan perahu kecil dan alat tangkap sederhana, namun keberlanjutan aktivitas ini tetap terjaga berkat ketersediaan sumber daya alam yang relatif stabil.

Selain hasil laut, masyarakat juga memanfaatkan potensi sumber daya alam lain yang berada di sekitar kampung. Hutan menyediakan kayu, hasil hutan bukan kayu, serta bahan pangan alami yang mendukung ketahanan hidup masyarakat. Di sisi lain, dusun sagu menjadi bagian penting dari sistem pangan tradisional, di mana warga mengolah sagu sebagai bahan makanan pokok sekaligus cadangan ketika hasil laut berkurang. Kombinasi dari ketiga



Tempat jualan masyarakat (dok.ippm)

sumber daya ini menciptakan struktur ekonomi berbasis alam yang selaras dengan lingkungan dan budaya setempat.

Dari sisi perdagangan, Kampung Apuri masih memiliki ketergantungan kuat terhadap pasokan barang dari luar. Minimnya fasilitas pasar dan terbatasnya produksi lokal menyebabkan kebutuhan pokok, bahan industri, serta perlengkapan rumah tangga harus didatangkan dari kota atau kampung tetangga. Masyarakat memenuhi biaya hidup serta aktivitas ekonomi mereka terutama melalui dana pribadi dari hasil penjualan ikan atau hasil hutan, sementara bantuan dari luar baik pemerintah maupun lembaga sosial digunakan sebagai tambahan dukungan untuk program pemberdayaan dan pembiayaan usaha kecil.

Keberadaan dermaga kampung menjadi infrastruktur ekonomi yang sangat vital. Dermaga menjadi pintu masuk utama bagi pasokan barang serta jalur distribusi hasil tangkapan nelayan ke wilayah sekitar. Selain mendukung mobilitas penduduk, fasilitas ini juga memperlancar hubungan dagang antara Kampung Apuri dan pusat ekonomi di Distrik Mimika Barat. Dengan dukungan infrastruktur tersebut, aktivitas perikanan dan distribusi barang dapat berjalan lebih efisien meskipun akses ekonomi kampung masih bergantung pada wilayah luar.

7. Peribadatan

Kehidupan keagamaan di Kampung Apuri berpusat pada Gereja Paroki Maria Bintang Laut sebagai tempat ibadah utama, yang dilengkapi dengan sebuah kapela untuk menunjang kebutuhan rohani umat di lingkungan yang lebih dekat dengan permukiman. Kedua bangunan ibadah tersebut berada dalam kondisi yang layak dan terawat, dengan kapela yang mampu menampung hingga sekitar 150 orang sehingga cukup memadai untuk kegiatan keagamaan skala lingkungan. Keberadaan gereja dan kapela ini memperkuat nuansa religius kampung serta menjadi ruang penting bagi aktivitas spiritual dan sosial masyarakat.

Kegiatan keagamaan berlangsung secara teratur melalui ibadah Minggu yang dihadiri oleh umat dari berbagai kelompok usia, serta misa harian yang diadakan pukul 06.00 sebagai bagian dari rutinitas rohani pagi. Pembinaan iman bagi anak-anak dilakukan melalui sekolah minggu, sementara bagi orang dewasa tersedia kelompok doa atau komunitas basis yang aktif berkumpul di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menjadi pusat liturgi, lembaga keagamaan di Kampung Apuri memiliki

peran luas dalam kehidupan masyarakat, antara lain memberikan dukungan sosial ketika warga menghadapi musibah, memperkuat pendidikan moral melalui arahan dan bimbingan rohani, serta menggerakkan kegiatan sosial seperti kerja bakti, pendampingan keluarga, dan berbagai bentuk solidaritas antarwarga. Peran yang komprehensif ini menjadikan gereja sebagai salah satu pilar utama dalam membangun ketertiban, kebersamaan, dan kesejahteraan masyarakat Kampung Apuri.

8. Olahraga dan Rekreasi

Ketersediaan fasilitas olahraga di Kampung Apuri masih terbatas. Tidak terdapat lapangan sepak bola khusus, sehingga anak-anak maupun remaja kerap memanfaatkan landasan pacu pesawat sebagai tempat bermain bola pada waktu-waktu tertentu ketika tidak ada aktivitas penerbangan. Ruang terbuka ini menjadi alternatif utama bagi kegiatan fisik dan permainan kelompok, sekaligus menjadi titik interaksi sosial bagi anak muda di kampung.

Dari sisi rekreasi, Kampung Apuri memiliki dua ruang alam yang menjadi tujuan utama masyarakat, yaitu Pantai Apuri dan kawasan taman mangrove. Pantai Apuri menjadi tempat berkumpul, beristirahat, dan menikmati pemandangan laut, sementara taman mangrove menyediakan ruang edukasi dan rekreasi yang sekaligus mencerminkan kekayaan ekologi pesisir kampung. Aktivitas pemuda juga terlihat melalui kegemaran mereka dalam bermusik serta mempertahankan budaya lokal seperti tari seka yang kerap ditampilkan dalam berbagai acara kampung.



Potensi Wisata Mangrove Kpg Apuri (dok.ippm)

Kehidupan sosial masyarakat semakin semarak melalui penyelenggaraan berbagai event kampung, termasuk festival budaya, lomba, dan pertandingan olahraga yang rutin digelar setiap tanggal 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya mempererat kebersamaan, tetapi juga menjadi wadah untuk menampilkan identitas budaya setempat. Melihat kekayaan tradisi yang dimiliki, Kampung Apuri memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata desa berbasis budaya yang memadukan seni, adat, dan potensi alam sebagai daya tarik bagi pengunjung dari luar.

BAGIAN IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN KAMPUNG

A. Infrastruktur Kampung Rasa Kota

Konsep infrastruktur kampung berstandar kota selaras dengan paradigma "membangun dari kampung ke kota", yang menempatkan kampung sebagai fondasi pertumbuhan dengan memperkuat kualitas infrastrukturnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Gagasan membangun kampung rasa kota menjadi wujud praktisnya, yaitu menghadirkan pelayanan, kenyamanan dan aksesibilitas setara perkotaan tanpa menghilangkan identitas sosial, budaya dan kearifan lokal.

Kebutuhan infrastruktur kampung rasa kota di kampung Apuri pada tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Kebutuhan Infrastruktur Kampung Rasa Kota Di Kampung Apuri

No	Komponen Infrastruktur	Kondisi Eksisting	Kebutuhan Prioritas	OPD Penanggungjawab
1.	Akses Air Bersih dan Sambungan Pipa Rumah	- Sebagian besar rumah warga belum terlayani sambungan jaringan pipa air bersih hingga ke rumah - Lebih dari 95% keluarga masih bergantung pada air hujan sebagai sumber utama air bersih.	- Penyelesaian sambungan rumah (SR) bagi seluruh KK - Peningkatan kapasitas dan kontinuitas suplai air bersih	UPTD SPAM Dinas PUPR (Cipta Karya)
2.	Rumah Layak Huni	- Lebih dari separuh rumah warga masih berada pada kondisi tidak layak huni. - Karena tida ada rumah sehingga 2-3 KK menempati 1 rumah sehingga padat	- Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat dan pecahan KK yang sudah punya Kartu Keluarga	Dinas PMK, Dinas PKPP
3.	Transportasi reguler	Transportasi reguler belum tersedia, masyarakat terpaksa berjalan kaki ketika terjadi kondisi darurat.	Penyediaan transportasi regular, khususnya dalam situasi darurat.	Dinas perhubunga, Distrik Mimika Barat

Sumber: Hasil FGD, 2025

B. Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Lokal

Pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi lokal menjadi kunci dalam mewujudkan konsep membangun dari kampung ke kota dan membangun kampung rasa kota, yaitu memperkuat aktivitas ekonomi sejak level kampung agar menjadi fondasi

pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, potensi unggulan didorong untuk dikelola secara lebih profesional dengan dukungan fasilitas yang setara standar perkotaan mulai dari akses pasar modern, fasilitas penyimpanan layak, hingga pendampingan kelembagaan dan legalitas usaha tanpa menghilangkan identitas budaya dan nilai komunal masyarakat.

Kebutuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal di kampung Apuri pada tahun 2026 sebagai tabel berikut:

Tabel 4.2 Kebutuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal Di kampung Apuri

No	Komponen Infrastruktur	Kondisi Eksisting	Kebutuhan Prioritas	OPD PenanggungJawab
1.	Produksi Perikanan Tangkap	Perikanan menjadi mata pencaharian utama masyarakat lokal, didominasi nelayan skala kecil dengan peralatan sederhana dan hasil tangkapan bergantung musim.	- Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan (perahu, alat tangkap sederhana yang ramah lingkungan - Pendampingan teknis untuk meningkatkan produktivitas. - Peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan, penanganan hasil tangkapan, dan diversifikasi usaha perikanan guna mengurangi ketergantungan pada musim	Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Distrik Mimika Barat

Sumber: Hasil FGD, 2025

C. SDM, Budaya dan Lingkungan Berkelanjutan

Penguatan SDM, budaya dan lingkungan berkelanjutan merupakan inti dari konsep membangun dari kampung ke kota dan membangun kampung rasa kota, yaitu menghadirkan kualitas hidup modern tanpa meninggalkan jati diri lokal. Melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pelestarian nilai budaya, dan pengelolaan lingkungan yang sehat, kampung dapat tumbuh layak, maju, dan berdaya saing, namun tetap berakar pada kearifan lokal dan harmoni alam.

Kebutuhan SDM, budaya, dan lingkungan berkelanjutan di kampung Apuri pada tahun 2026 sebagai tabel berikut:

Tabel 4.3 Kebutuhan SDM, budaya, dan lingkungan berkelanjutan Di kampung Apuri

No.	Komponen Infrastruktur	Kondisi Eksisting	Kebutuhan Prioritas	OPD Penanggung Jawab
1.	Peningkatan SDM untuk mengelola parawisata	Tersedianya potensi wisata seperti Pantai Apuri dan juga taman wisata mangrove	- Penataan dan pengelolaan potensi Pantai Apuri serta kawasan mangrove agar dapat berfungsi sebagai destinasi wisata berbasis alam dan edukasi - Penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata, melalui pelatihan pemandu wisata - Pengembangan usaha pendukung seperti kios UMKM, serta promosi destinasi wisata secara bertahap	Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Distrik Mimika Barat

Sumber: Hasil FGD, 2025

BAGIAN V. P E N U T U P

Kampung Apuri di Distrik Mimika Barat merupakan komunitas yang memiliki kekayaan alam dan budaya sekaligus mencerminkan dinamika sosial yang khas. Upaya pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk mendekati standar kawasan perkotaan, mulai dari peningkatan jalan poros dan jalan lingkungan, penyediaan air bersih, penerangan, hingga fasilitas publik seperti ruang terbuka hijau dan sarana pendidikan. Meski demikian, tantangan mendasar masih terlihat pada aspek hunian layak, sanitasi, dan ketersediaan layanan dasar sehingga ketiganya menjadi fokus pembangunan berkelanjutan yang digerakkan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat.

Dari sisi ekonomi dan sumber daya manusia, masyarakat kampung Apuri memiliki potensi produktif yang kuat, terutama dalam sektor perikanan dan UMKM berbasis bahan pangan lokal seperti sagu. Penguatan melalui pelatihan, pendampingan usaha, serta dukungan akses modal dan pasar menjadi langkah penting agar potensi tersebut berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Pada ranah pendidikan dan budaya, aktivitas keagamaan, pembinaan karakter, serta pengembangan seni dan keterampilan bagi pemuda menunjukkan komitmen untuk menjaga identitas lokal sembari memperkuat kapasitas masyarakat agar semakin mandiri dan kompetitif.

Secara keseluruhan, Kampung Apuri berada dalam fase transformasi menuju lingkungan yang modern, nyaman dihuni, dan produktif tanpa meninggalkan akar budaya setempat. Pendekatan pembangunan yang menekankan prinsip “membangun dari kampung ke kota” dan “kampung rasa kota” mengintegrasikan peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi, penguatan pendidikan, pelestarian budaya, dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan semangat kolaboratif antara pemerintah, pemangku kepentingan lokal, dan warga kampung Apuri berpotensi menjadi contoh kampung yang maju, inklusif, serta harmonis antara kemajuan modern dengan kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2025). *Kabupaten Mimika dalam Angka Tahun 2024,* Kantor BPS Kabupaten Mimika, Timika

Badan Pusat Statistik. (2025). *Distrik Mimika Barat dalam Angka Tahun 2024,* Kantor BPS Kabupaten Mimika, Timika

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (2025). *Data Agregat Kependudukan (Semester I Tahun 2025).* Dinas Dukcapil, Timika

Republik Indonesia, (2014), *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*